

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021-2026





KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat TuhanYang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dapat disusun sesuai dengan amanat dan arahan pembangunan nasional.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 ini disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan kemudian dengan perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, telah mendorong kebutuhan digitalisasi usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. menjadi semakin krusial. Pada era new normal, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Para pelaku usaha, industri dan sektor ekonomi terdesak untuk bertransformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendorong percepatan penyediaan



infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital nasional pada 5 (lima) tahun ke depan dan merujuk pada Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang "Sombere' dan Smart City" dengan Imunitas Kuat untuk Semua, Revolusi SDM serta Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik kelas Dunia bersih dari Indikasi Korupsi serta program multi inovasi yaitu Makassar Recover yang merupakan salah satu program kerja kota Makassar untuk didedikasikan sebagai program gebrakan baru yang terintegrasi dalam data dan berbasis teknologi.

Fokus Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021—2026 diarahkan untuk mencapai 5 (Lima) tujuan utama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Kota Makassar, percepatan transformasi digital pada dunia industri, pemerintahan, dan masyarakat, peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik, penerapan keamanan Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Melaksanakan manajemen asset Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Layanan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja, dan kerangka pendanaan, yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika selama 5 (lima) tahun ke depan yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan keberlanjutan perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 ini.



RENSTRA DISKOMINFO TAHUN 2021-2026

Makassar, 20 Oktober 2021

**Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Makassar**


Denny Hidayat
Pangkat: Pembina
Nip.: 19750505 200003 1 009



RINGKASAN EKSEKUTIF

Makassar memiliki kekuatan yang besar untuk kembali bangkit dengan memaksimalkan segenap kekuatan sumber daya manusia untuk tumbuh menjadi Kota Dunia Yang "Sombere' dan Smart City" dengan Imunitas Kuat untuk Semua, khususnya melalui digitalisasi. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021—2026 berupaya membangun fundamental digital secara lebih terstruktur dan masif serta menekankan pada pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Makassar Recover.

Infrastruktur TIK sebagai landasan utama menuju digitalisasi ,harus dijamin untuk dapat dinikmati hingga ke seluruh wilayah kota Makassar, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat. Dalam upaya menuntaskan infrastruktur TIK, Dinas Komunikasi dan Informatika memprioritaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik.

Penuntasan infrastruktur TIK akan diselaraskan dengan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) talenta digital dan ekosistem ekonomi digital, antara lain dengan pelatihan SDM digital, percepatan transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis, dan pengembangan startup digital. Dari sisi pemerintahan dan pelayanan publik, Dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan transformasi digital pemerintahan, antara lain dengan percepatan pemanfaatan Pusat Data dengan mendukung program multi inovasi yaitu Makassar Recover diimplementasikan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sebagai regulator, Dinas Komunikasi dan Informatika mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik yang berupa undang-undang, peraturan Presiden, peraturan menteri, peraturan daerah dan peraturan walikota dengan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Terakhir, pada upaya peningkatan kualitas tata kelola manajemen internal, akan dilakukan peningkatan kompetensi SDM internal, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi



dan akuntabilitas kinerja, serta mendorong inovasi dalam perencanaan penganggaran, seperti dalam merancang skema pembiayaan program atau proyek strategis.

Dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan transformasi digital pemerintahan, antara lain dengan percepatan pemanfaatan Pusat Data dengan menyelaraskan program multi inovasi yaitu Makassar Recover.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSAR	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	42
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	47
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	48
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	48
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	55
3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika	58
3.4. Telaahan Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	60
3.5. Telaahan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (BPS)	62
3.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	64
3.7. Penentuan Isu-isu Strategis	66
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	67
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	67
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	70
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	72
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	80
BAB VIII PENUTUP	84



DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Kondisi Kepegawaian Menurut Jabatan	22
Tabel 2.2.2 SDM Non PNS.....	23
Tabel 2.2.3 Kondisi Kepegawaian Menurut Pangkat/ Golongan	24
Tabel 2.2.4 Kondisi Kepegawaian Menurut Eselon	24
Tabel 2.2.5 Kondisi Kepegawaian Menurut Pendidikan Formal/Non Formal	25
Tabel. 2.2.6 Kondisi Secara Umum Aset Dinas Komunikasi dan Informatika.....	25
Tabel 2.3.1. Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Makassar Tahun 2015-2016 (Tabel TC 23)	43
Tabel 2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2015-2019 (Tabel TC 24)	45
Tabel 2.3.3 Pencapaian Kinerja Dinas Komunkasi Dan Informatika Kota Makassar Tahun 2020	46
Tabel 2.3.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2020	46
Tabel 4.1.1 Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Beserta Indikator (Tabel TC 25)	68
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar (Tabel T-C.26.)	71
Tabel 5.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2022-2026 (Tabel T-C.27.)	73
Tabel 7.1 Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	81
Tabel 7.2 Tabel Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022 – 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	82
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Tabel T-C.28.)	83



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional tentang kewajiban daerah menyusun Rencana Strategis sangat jelas. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam menyusun perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) PD sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD. Rencana Strategis (Renstra) PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah yang tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis War Room Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika, serta secara tertulis per 1 Januari 2021, Pemerintah Kota Makassar melakukan perampingan struktur organisasi dengan melebur Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Kota Makassar ke Dinas Komunikasi dan Informatika, Peleburan unit kerja tersebut mengacu pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.



Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rancangan awal RPJMD menjadi dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika itu sendiri. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir; dan penetapan. Penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Ketentuan mengenai Tahapan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dapat berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Terkait agenda pembangunan pembangunan tahun 2020-2024 mengemukakan 7 (tujuh) skala prioritas yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
5. Membangun Lingkungan Hidup;
6. Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Di mana memiliki hubungan dengan visi RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026 yakni percepatan Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang "Sombere' dan Smart



City" dengan Imunitas Kuat untuk Semua, dalam usaha mewujudkan visi dalam memberikan arah sekaligus batasan-batasan proses pencapaian tujuan misi RPJMD kota Makassar yang memiliki hubungan dengan RPJMN bahwa misi RPJM 2020-2024 tentang peningkatan kualitas manusia, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dan sinergi pemerintah dalam kerangka Negara kesatuan, hubungannya dengan misi pertama RPJMD kota Makassar tahun 2021-2026 yaitu Revolusi sumber daya manusia dan percepatan reformasi birokrasi menuju sumber daya manusia yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi. Misi RPJN tahun 2020-2024 tentang pembangunan yang merata dan berkeadilan dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, hubungannya dengan misi kedua RPJMD kota Makassar tahun 2021-2026 yaitu rekonstruksi kesehatan ekonomi dan social budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesejahteraan kota yang kuat untuk semua serta Misi RPJN tahun 2020-2024 tentang mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkesinambungan, kemajuan budaya dan yang mencerminkan kepribadian bangsa, sistem hukum yang bebas korupsi dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, hubungannya dengan dengan misi ketiga RPJMD kota Makassar tahun 2021-2026 yakni restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere dan smart city untuk semua.

Renstra Perangkat Daerah yang terhubung dengan misi RPJMD provinsi dan misi RPJMD Kota Makassar tertuang sebagai berikut : misi RPJMD provinsi tahun 2018-2023 tentang mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif dan mewujudkan pusat-pusat ekonomi baru yang produktif hubungannya dengan misi pertama RPJMD kota Makassar tahun 2021-2026 yaitu Revolusi sumber daya manusia dan percepatan reformasi birokrasi menuju sumber daya manusia yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi. Misi RPJMD provinsi tahun 2018-2023 tentang mewujudkan pusat-pusat ekonomi baru yang produktif dan meningkatkan produktifitas serta daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan hubungannya dengan misi kedua RPJMD kota Makassar tahun 2021-2026 yakni rekonstruksi kesehatan, ekonomi dan social budaya menuju masyarakat sejahtera



dengan imunitas ekonomi dan kesejahteraan kota yang kuat untuk semua. Misi RPJMD provinsi tahun 2018-2023 tentang mewujudkan pusat-pusat ekonomi baru yang produktif meningkatkan produktifitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan erat hubungannya dengan misi ketiga RPJMD kota Makassar tahun 2021-2026 restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang somber dan smart city untuk semua, sehingga dapat diselaraskan program percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Kota Makassar yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 5 tahun 2021 tentang Makassar Recover.

Sehubungan dengan hal tersebut Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah kemudian dengan perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai 5 (Lima) program yakni:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor;
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Seiring Itu Pula diterbitkannya Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis War Room Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagai Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT War Room pada Dinas Komunikasi dan Informatika dilengkapi perangkat Closed Cirkuit Television yang selanjutnya disingkat CCTV adalah kamera video untuk menampilkan dan merekam



gambar pada waktu dan tempat di mana pun perangkat dipasangkan yang terhubung pada sistem jaringan Pemerintah Kota Makassar dan adanya Server dengan sistem komputer yang menjadikan jenis layanan (service) tertentu dalam sebuah jaringan computer, serta dilengkapi pula Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disingkat NTPD 112 adalah layanan aduan Pemerintah Kota Makassar yang terhubung melalui telepon yang bias diakses oleh masyarakat secara gratis melalui telepon.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional tentang kewajiban daerah menyusun Rencana Strategis;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Peraturan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;



10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika;
26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis War Room Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika;
27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
28. Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Makassar Recover;
29. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 adalah sebagai dokumen arah perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan, strategi dan kebijakan, program dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika ini adalah untuk menyeleraskan visi dan misi dan program pilihan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2021-2026 tentang Makassar Recover



1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra , serta sistematika penulisannya.

2. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat tentang Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah, Sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.

3. BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Bab ini memuat su-isu strategis bidang kependudukan yang berkembang dalam jangka waktu lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

4. BAB IV Tujuan, dan Sasaran

Bab ini memuat, tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. serta strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

5. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat serta strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

6. BAB VI Kerangka Pendanaan Serta Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

7. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

8. BAB VIII Penutup



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSAR

Ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanahkan Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, mengatur Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Organisasi Perangkat Daerah urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan Urusan Persandian di Kota Makassar sebagaimana Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya mengacu pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika, dengan struktur organisasi secara lengkap terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Aplikasi dan Informatika, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Informasi dan Telekomunikasi;
 - b. Seksi Aplikasi dan Telematika;
 - c. Seksi Standarisasi, Monitoring dan Evaluasi.
4. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
 - a. Seksi Komunikasi Sosial;
 - b. Seksi Komunikasi Pembangunan dan Pemerintahan Daerah;
 - c. Seksi Penyiaran Dan Kemitraan Media.



5. Bidang Pengolahan Data Elektronik, terdiri atas:
 - a. Seksi Kompilasi Dan Integrasi Data;
 - b. Seksi Statistik;
 - c. Seksi Penyajian Informasi.
6. Bidang Persandian, terdiri atas:
 - a. Seksi Tata Kelola Persandian;
 - b. Seksi Operasional Pengaman Persandian;
 - c. Seksi Pengawasan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar secara lebih jelas adalah sebagai berikut:





Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar meliputi:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
 - b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
 - e. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Berdasarkan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas
 - a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika
 - b. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;
 - c. Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengolahan Data Elektronik dan Bidang Persandian;
 - d. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
 - e. Mengoordinasikan dan merumuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya

- f. Merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas
- g. Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana
- h. Melaksanakan pengendalian dan perencanaan teknis operasional di Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengolahan Data Elektronik dan Bidang Persandian;
- i. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya
- j. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
- l. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan
- n. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya
- o. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- p. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui Sekretaris Daerah;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika dibantu oleh:

1. Sekertariat



Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian
- b. Pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat
- b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat;
- e. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat;
- f. Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;
- g. Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyiapan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;



- h. Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas;
- i. Mengoordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- j. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset serta urusan kehumasan, dokumentasi dan protokoler dinas
- k. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset serta urusan kehumasan, dokumentasi dan protokoler dinas;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- m. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
- o. Melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara di lingkup dinas
- p. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Aplikasi dan Informatika

Bidang Aplikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan menyusun dan melaksanakan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, Data Center, Disaster Recovery Center, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kota serta pengembangan Sumber Daya TIK, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City.

Bidang Aplikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi



- a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang aplikasi dan informatika
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang aplikasi dan informatika
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang aplikasi dan informatika
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang aplikasi dan informatika
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya
- Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Bidang Aplikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas:
- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Aplikasi dan Informatika
 - b. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Aplikasi dan Informatika
 - c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Aplikasi Dan Telematika
 - d. Menyelenggarakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi/lembag publik dalam lingkup pemerintah Kota Makassar,
 - e. Menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Makassar, layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah kota,
 - f. Mayanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, menetapkan tatakelola nama domain, sub domain
 - g. Menyelenggarakan pembangunan layanan pusat data (big data dan open data)
 - h. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK
 - i. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya



- k. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
 - m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kota.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang informasi dan komunikasi public
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang informasi dan komunikasi public
- c. Pengoordinasian kegiatan di bidang informasi dan komunikasi public
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang informasi dan komunikasi public
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- c. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- d. Menyiapkan bahan perumusan dan petunjuk teknis serta melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi



dan kajian teknis dalam melayani kebutuhan komunikasi dan informasi masyarakat, untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kota serta pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota Makassar

- e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi dan kajian teknis dalam melayani kebutuhan komunikasi dan informasi masyarakat untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kota serta pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota Makassar
 - f. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kota serta pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota Makassar
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
 - h. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
 - i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
 - j. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
4. Bidang Pengolahan Data Elektronik

Bidang Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan perumusan kebijakan Layanan Infrastruktur dasar Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government,



Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah.

Bidang Pengolahan Data Elektronik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang pengolahan data elektronik
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pengolahan data elektronik
- c. Pengoordinasian kegiatan di bidang pengolahan data elektronik
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengolahan data elektronik
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya

5. Bidang Persandian

Bidang Persandian mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Bidang Persandian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan operasional di Bidang Persandian
- b. Melaksanakan kegiatan di bidang persandian
- c. Mengoordinasian kegiatan di bidang persandian
- d. Mengendalikan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang persandian
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Bidang Persandian mempunyai uraian tugas :

- a. Perencanan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Persandian
- b. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Persandian
- c. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Persandian
- d. Menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota Makassar
- e. Menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya



- g. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
- i. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatab Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsioanl terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya dan masing-masing dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

7. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Warr Room

Di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk unit pelaksana teknis yaitu UPT War Room pada Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelayanan teknis operasional War Room.

UPT War Room dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan operasional war room
- b. Melaksanaan kegiatan operasional war room
- c. Membagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan operasional war room
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud , UPT War Room mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana operasional UPT War Room berdasarkan program kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien



- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan
- e. Membuat perencanaan pelaksanaan pemasangan baru, perbaikan dan pemeliharaan terhadap CCTV, server, NTPD 112 dan jaringan dalam wilayah Kota Makassar
- f. Melaksanakan pendataan, pemasangan baru, perbaikan, dan pemeliharaan Closed Circuit Television CCTV, server, NTPD 112 dan jaringan
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap berfungsinya CCTV, server, NTPD 112 dan jaringan
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan/pemakaian peralatan CCTV, server, NTPD 112 dan jaringan
- i. Pengadaan/penyediaan, penyimpanan dan distribusi barang kebutuhan dan peralatan CCTV, server, NTPD 112 dan jaringan
- j. Mengumpulkan dan mengelola seluruh data yang berkaitan dengan Kota Makassar dan pemerintahannya dalam membentuk system atau data (One Data) sebagai bagian dari sistem pengambil keputusan berdasarkan data (Decision Support System)
- k. Melaksanakan pengaturan penggunaan dan perawatan terhadap sarana dan prasarana War Room
- l. Melaksanakan urusan ketatausahaan unit
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya dengan mencari alternatif pemecahannya dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang
- n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
- o. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kondisi Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar terdiri dari Komposisi sebagai berikut:

Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar berjumlah 48 orang ini berada di Sekretariat dan di empat bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Tabel 2.2.1 Kondisi Kepegawaian Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki -Laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	0	0	0
2	Sekretaris	1	0	1
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	1	0	1
4	Kepala Subbagian Keuangan	1	0	1
5	Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	0	1
6	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	1	0	1
7	Kepala Seksi Pengembangan Informasi dan Telekomunikasi	0	0	0
8	Kepala Seksi Aplikasi dan Telematika	1	0	1
9	Kepala Seksi Standarisasi, Monitoring dan Evaluasi	0	0	0
10	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	0	1
11	Kepala Seksi Komunikasi Sosial	0	0	0
12	Kepala Seksi Komunikasi Pembangunan dan Pemerintahan Daerah	1	0	1
13	Kepala Seksi Penyiaran Dan Kemitraan Media	0	1	1
14	Kepala Bidang Pengolahan Data Elektronik	1	0	1
15	Kepala Seksi Kompilasi Dan Integrasi Data	0	0	0
16	Kepala Seksi Statistik	0	0	0
17	Kepala Seksi Penyajian Informasi	1	0	1



18	Kepela Bidang Persandian	1	0	1
19	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian	0	1	1
20	Kepala Seksi Operasional Pengaman Persandian	0	0	0
21	Seksi Pengawasan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian	0	0	0
	Kepala UPT Wallroom	1	0	1
	Pelaksana	18	13	31
	Jabatan Fungsional	0	1	1

Sumber daya manusia non pegawai negeri sipil yang di miliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar berjumlah 88 orang

Tabel 2.2.2 SDM Non PNS

No	Unit kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki -Laki	Perempuan	
Sekertariat				
1	Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	1	3	4
2	Subbagian Keuangan	1	6	7
3	Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	3	4
Bidang Aplikasi dan Informatika				
4	Seksi Pengembangan Informasi dan Telekomunikasi	0	1	1
5	Seksi Aplikasi dan Telematika	1	0	1
6	Seksi Standarisasi, Monitoring dan Evaluasi	2	0	1
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				
7	Seksi Komunikasi Sosial	2	1	3
8	Seksi Komunikasi Pembangunan dan Pemerintahan Daerah	1	2	3
9	Seksi Penyiaran Dan Kemitraan Media	1	2	0
Bidang Pengolahan Data Elektronik				
13	Seksi Kompilasi Dan Integrasi Data	2	0	2
14	Seksi Statistik	1	1	2



15	Seksi Penyajian Informasi		2	2
Bidang Persandian				
17	Seksi Tata Kelola Persandian	0	1	1
18	Seksi Operasional Pengaman Persandian	0	1	1
19	Seksi Pengawasan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian	1	0	1
Unit Pelayanan Teknis				
20	UPT Warr Room			

2. Komposisi Menurut Pangkat / Golongan

Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar terdiri dari golongan 4 berjumlah 9 orang, golongan 3 berjumlah 38 orang, golongan 2 berjumlah 2 orang , berarti 78 persen pegawai adalah golongan 3

Tabel 2.2.3 Kondisi Kepegawaian Menurut Pangkat/ Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Juru	0	0	0
2	Pengatur	1	1	2
3	Penata	18	19	37
4	Pembina	7	0	7

3. Komposisi Menurut Eselon

Pegawai Negeri Sipil di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar yang menduduki jabatan atau eselon adalah

Tabel 2.2.4 Kondisi Kepegawaian Menurut Eselon

No	Esalon	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Esalon II	0		0
2	Esalon III	4		4
3	Esalon IV	8	3	11

4. Menurut Pendidikan Formal / Non Formal

Pegawai negeri sipil di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar terdiri dari berbagai jenjang Pendidikan antara lain:

**Tabel 2.2.5 Kondisi Kepegawaian Menurut Pendidikan Formal/Non Formal**

No	Pendidikan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	S3	1	0	1
1	S2	12	1	13
2	S1	12	14	26
3	Diploma tiga	0	2	2
4	SMA	3	1	4

5. Kondisi Perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar meliputi :
- Terkait dengan aset yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika adalah terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagai berikut:

Tabel. 2.2.6 Kondisi Secara Umum Aset Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Nama Barang	Merk/Tipe	Tahun	Jumlah	Harga
1	2	3	4	5	6
ASET TETAP				1239	30,258,322,467.99
1	Pompa Air/pompa air	SANYO	2017	1	39,500,000.00
2	Station Wagon	DAIHATSU LUXIO	2011	1	154,700,000.00
3	Station Wagon/Mobil	Daihatsu Luxio D M/T	2015	1	176,850,000.00
4	Station Wagon	Daihatsu Great New Xenia R AT	2018	1	211,850,000.00
5	Station Wagon	Dahitatsu Great New Xenia R AT	2018	1	211,850,000.00
6	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)/Microbus Deluxe AC standar 16 Seat	ISUZU	2017	1	386,560,000.00
7	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)/Mobil Mini Bus Daihatsu Grand Max PU	Daihatsu	2016	1	130,050,000.00
8	Sepeda Motor	Suzuki Address F1 110	2018	1	15,971,000.00
9	Sepeda Motor/Motor	Suzuki	2010	1	11,685,000.00
10	Sepeda Motor/Motor	Suzuki Smash	2004	1	9,876,000.00
11	Sepeda Motor	SUZUKI	2017	1	15,666,000.00
12	Sepeda Motor/Sepeda Motor	Yamaha	2010	1	14,046,500.00
13	Mobil Unit Penerangan Darat/Mobil	Daihatsu-Luxio 1.500 MT	2012	1	160,000,000.00



RENSTRA DISKOMINFO TAHUN 2021-2026

14	Mobil Unit Penerangan Darat/Mobil	Suzuki APV DLX	2006	1	109,500,000.00
15	Mobil Unit Penerangan Darat/Mobil	ISUZU Panther TBR 54/Smart	2010	1	185,350,000.00
16	Mobil Unit Penerangan Darat/Mobil	Suzuki Cary 1.5 / ST 150 FUTURA	2004	1	83,250,000.00
17	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya/Mobil	Isuzu ELF NKR 55	2007	1	410,000,000.00
18	Lemari Penyimpan	Riel & Rick	2016	1	5,000,000.00
19	Lemari Penyimpan/Almari (locker) SL. WO49, 1850 x 900 x 450	Riel & Rick	2016	2	10,000,000.00
20	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)/Mesin Ketik 27 Inch	Olivetti	2012	1	2,750,000.00
21	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)/Mesin Ketik Manual	Olivetti L	2013	1	1,920,000.00
22	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)/Mesin Ketik Manual	Olivetti L	2013	1	1,920,000.00
23	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)/Mesin Ketik	Olivetti L	2008	1	2,750,000.00
24	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Olivetti	2016	1	3,500,000.00
25	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)/Mesin Ketik Listrik	Brother	2013	1	3,000,000.00
26	Mesin Fotocopy Folio/Mesin Foto Copy	GESTENER	2015	1	38,000,000.00
27	Lemari Besi/Metal/Lemari Arsip	Brother	2008	1	1,850,000.00
28	Lemari Besi/Metal/lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Riel & Rick	2017	1	4,500,000.00
29	Lemari Besi/Metal/Lemari Arsip	Brother	2003	4	5,000,000.00
30	Lemari Besi/Metal/lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Riel & Rick	2017	1	4,500,000.00
31	Lemari Besi/Metal/Lemari Arsip	Brother	2003	1	1,250,000.00
32	Lemari Besi/Metal/Almari	RIEL & RICK	2017	1	4,500,000.00
33	Lemari Besi/Metal/Lemari Arsip Star AJ 303	Star	2016	1	2,900,000.00
34	Lemari Besi/Metal/Lemari Arsip	Brother	2008	1	1,850,000.00
35	Lemari Besi/Metal/Lemari Besi/Metal Riel & Rick SL - W035 1850x900x450	Riel & Rick	2019	1	4,500,000.00
36	Lemari Besi/Metal/Lemari Arsip	Brother	2008	1	1,850,000.00
37	Lemari Besi/Metal/lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Riel & Rick	2017	1	4,500,000.00
38	Lemari Besi/Metal/lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Riel & Rick	2017	1	4,500,000.00



RENSTRA DISKOMINFO TAHUN 2021-2026

39	Lemari Besi/Metal/Lemari Besi (Big Plan Lemari Arsip)	Big Plan	2020	1	2,400,000.00
40	Lemari Besi/Metal/Lemari Arsip	Brother	2008	1	1,850,000.00
41	Lemari Besi/Metal/Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	BROTHER	2015	2	7,000,000.00
42	Lemari Besi/Metal/Lemari Besi / Metal	Front Line	2018	1	4,500,000.00
43	Lemari Kayu/Lemari Buku Arsip	Matriks	2007	1	2,760,000.00
44	Lemari Kayu/Lemari Arsip Gantung	Jati 5 Mtr	2013	1	12,500,000.00
45	Lemari Kayu/Lemari Kayu	-	2010	1	3,250,000.00
46	Lemari Kayu/Lemari Buku Arsip	Matriks	2007	4	11,040,000.00
47	Rak Besi/Rak Buku/TV	lokal	2015	1	3,000,000.00
48	Filing Cabinet Besi/Filling Kabinet	Brother	2007	3	5,250,000.00
49	Filing Cabinet Besi/Filling Cabinet	Brother	2005	1	1,750,000.00
50	Filing Cabinet Besi/Filling Kabinet 4 laci	Brother	2013	1	2,500,000.00
51	Filing Cabinet Besi/Filling Cabinet	Brother	2005	1	1,750,000.00
52	Filing Cabinet Besi/Filling Kabinet	Brother	2007	1	1,750,000.00
53	Filing Cabinet Besi/Filling Kabinet	Brother	2007	1	1,750,000.00
54	Filing Cabinet Besi/Filling Kabinet	Brother	2007	1	1,750,000.00
55	Lemari Kaca/Lemari Arsip Kaca	Wifile	2014	1	4,000,000.00
56	Lemari Kaca/Lemari Arsip Kaca	Wifile	2014	1	4,000,000.00
57	White Board/White Board	lokal	2009	1	1,650,000.00
58	Alat Penghancur Kertas/Penghancur Kertas Kozure KS-3500 MC	Kozure	2019	1	6,000,000.00
59	Alat Kantor Lainnya/VERTICAL BLINDS		2017	1	53,216,162.00
60	Alat Kantor Lainnya/Layar Motoricet	Screnview	2008	1	7,480,000.00
61	Alat Kantor Lainnya/Lampu Sirine	LTF Landum	2006	1	5,843,000.00
62	Alat Kantor Lainnya/Papan Data Potensi	lokal	2010	1	13,000,000.00
63	Alat Kantor Lainnya/LCD Projector	Toshiba	2006	1	25,960,000.00
64	Alat Kantor Lainnya/Generator	Daishin/AD	2006	1	4,985,000.00
65	Alat Kantor Lainnya/LCD Proyektor	Optoma ES 256	2010	1	7,280,000.00
66	Alat Kantor Lainnya/Genset	Excell SF 2900 DX	2010	1	5,850,000.00
67	Papan Reklame/Signboard Free Wifi	-	2020	20	90,400,000.00
68	Kursi Besi/Metal/Meja Kerja Pimpinan	Gudo	2004	1	1,985,000.00



RENSTRA DISKOMINFO TAHUN 2021-2026

69	Meja Ketik/Meja Kerja	lokal	2007	4	9,240,000.00
70	Meja Ketik/Meja Kerja	lokal	2008	4	8,400,000.00
71	Meja Ketik/Meja Kerja	lokal	2007	1	2,310,000.00
72	Meja Ketik/Meja Kerja	lokal	2008	1	2,100,000.00
73	Meja 1/2 Biro/Meja Pimpinan 1 1/2 Biro		2014	2	9,000,000.00
74	Meja 1/2 Biro/Meja Kerja 1/2 Biro	-	2009	1	1,600,000.00
75	Meja 1/2 Biro/Meja Kerja 1/2 Biro	-	2009	2	3,200,000.00
76	Meja 1/2 Biro/Meja Pimpinan 1 1/2 Biro		2014	1	4,500,000.00
77	Meja 1/2 Biro/Meja Pimpinan 1 1/2 Biro		2014	1	4,500,000.00
78	Kursi Rapat/Kursi Rapat + Meja	Siro	2007	1	4,450,000.00
79	Kursi Rapat/Kursi Rapat	FUTURE	2015	50	20,000,000.00
80	Kursi Rapat/Kursi Rapat	Futura	2014	50	20,000,000.00
81	Kursi Rapat/Kursi Rapat + Meja	Siro	2007	1	4,450,000.00
82	Kursi Rapat/Kursi Rapat	Futura	2007	107	40,125,000.00
83	Kursi Rapat/Kursi Rapat + Meja	Siro	2007	1	4,450,000.00
84	Kursi Tamu/Kursi Tamu+Meja	Superland	2005	1	7,050,000.00
85	Kursi Putar/Kursi Rapat	Informa	2015	10	45,100,000.00
86	Kursi Biasa/Kursi Monitor Controller	informa	2015	4	20,680,000.00
87	Kursi Biasa/Kursi Monitor Operator	Informa	2015	12	54,120,000.00
88	Kursi Biasa/Kursi Pimpinan	Brother Pakai Roda + putar	2014	1	2,500,000.00
89	Kursi Biasa/Kursi Staf	Indachi Pakai Roda + putar	2014	5	7,500,000.00
90	Kursi Biasa/Kursi Pimpinan	Informa Class	2012	1	3,200,000.00
91	Sofa/Sofa	Matriks	2013	1	5,000,000.00
92	Sofa/kursi sofa bed	Informa	2017	1	12,500,000.00
93	Meja Biro/Meja Kerja	lokal	2007	6	8,738,400.00
94	Meja Biro/Meja Kerja	lokal	2006	10	14,564,000.00
95	Meja Biro/Meja Kerja	lokal	2006	1	13,860,000.00
96	Lemari Es/Kulkas	PANASONIC	2017	1	7,000,000.00
97	Lemari Es/Kulkas	LG	2014	1	5,580,000.00
98	Lemari Es/Lemari Es	LG	2015	1	6,000,000.00
99	Lemari Es/Kulkas 2 Pintu	Toshiba	2012	1	4,500,000.00
100	Lemari Es/Kulkas	PANASONIC	2017	1	7,000,000.00
101	Lemari Es/Lemari Es	SHARP	2018	1	6,800,000.00
102	A.C. Sentral/AC Sentral	Daikin	2015	2	51,700,000.00
103	A.C. Sentral/AC Sentral	Daikin	2015	2	33,000,000.00
104	A.C. Split/AC	Panasonic	2013	1	5,000,000.00
105	A.C. Split/AC Split	Panasonic	2007	1	7,700,000.00



RENSTRA DISKOMINFO TAHUN 2021-2026

106	A.C. Split/AC Split	PANASONIC	2015	2	15,000,000.00
107	A.C. Split/AC Unit		2015	1	192,544,257.00
108	A.C. Split/AC Split	PANASONIC	2015	1	7,500,000.00
109	A.C. Split/AC Split	Panasonic	2008	3	17,308,500.00
110	A.C. Split/Air Conditioner (AC) Uk 1 PK	Daikin	2020	2	12,435,000.00
111	A.C. Split/AC Split	Daikin	2015	1	5,500,000.00
112	A.C. Split/AC Split	PANASONIC	2015	2	15,000,000.00
113	A.C. Split/AC Split	PANASONIC	2015	1	7,500,000.00
114	A.C. Split/AC	Panasonic	2013	1	4,850,000.00
115	A.C. Split/AC Split	PANASONIC	2015	1	7,500,000.00
116	A.C. Split/AC Split	LG	2007	1	7,700,000.00
117	A.C. Split	pac	2016	1	199,996,500.00
118	A.C. Split/AC	Panasonic	2013	2	10,000,000.00
119	A.C. Split/AC Split	Panasonic	2007	1	7,700,000.00
120	A.C. Split/AC	Panasonic	2012	1	4,700,000.00
121	A.C. Split/AC	Panasonic	2014	2	14,000,000.00
122	A.C. Split/AC Split	PANASONIC	2015	1	7,500,000.00
123	A.C. Split/AC Unit		2015	1	204,160,000.00
124	A.C. Split/AC Split	LG	2007	1	5,985,000.00
125	A.C. Split/Air Conditioner (AC) Uk 2 PK	Daikin	2020	4	43,250,000.00
126	A.C. Split/AC Split	Daikin	2015	3	15,805,350.00
127	Exhaust Fan/Exhaust	Panasonic	2013	1	1,500,000.00
128	Exhaust Fan/Exhaust	Panasonic	2013	1	1,500,000.00
129	Exhaust Fan/Exhaust	Panasonic	2013	1	375,000.00
130	Televisi/TV LED 32	Samsung Smart	2013	1	31,500,000.00
131	Televisi/Televisi 32 Inchi	Samsung	2014	1	17,700,000.00
132	Televisi	Samsung	2020	25	122,500,000.00
133	Televisi/TV LED	Sony Bravia	2013	1	8,600,000.00
134	Televisi/TV Monitor L.Datar	Samsung	2008	1	5,000,000.00
135	Televisi	Samsung	2020	5	63,500,000.00
136	Televisi/LED TV Samsung Flip 2 WR55R	Samsung	2020	1	76,160,000.00
137	Televisi	LG	2017	1	48,018,500.00
138	Televisi/Televisi Warna	LG	2005	1	3,750,000.00
139	Televisi/TV LCD Consul	Samsung	2013	1	11,370,000.00
140	Televisi/TV LED 42 Inch Full HD Samsung	TV LED 42 Inch Full HD Samsung	2019	1	8,573,245.00
141	Televisi/Televisi 32 Inchi	Samsung	2014	1	5,900,000.00
142	Amplifier/Car Amplifier + Microphone	TOA ZA 250 S	2010	1	442,000.00
143	Amplifier/Amplifier	TOA ZH 1121	2006	1	2,852,000.00
144	Amplifier/Mixer Power Amplifier	TOA ZH 2060	2010	1	1,150,500.00
145	Amplifier/Amplifier	BMB	2013	1	3,500,000.00
146	Amplifier/Alat Musik Keyboard	Yamaha PSR	2006	1	24,750,000.00



RENSTRA DISKOMINFO TAHUN 2021-2026

147	Amplifier/Amplifier Dinoe	Sanken	2004	1	2,500,000.00
148	Loudspeaker/Loudspeker	Toa ZH/5025	2006	2	1,348,000.00
149	Loudspeaker/Mega phone	Toa/2R-2R	2008	3	2,953,500.00
150	Loudspeaker/Horn Speaker	TOA ZH 625 S	2010	1	585,000.00
151	Sound System/Speaker JBL EON PRO All In One	JBL	2020	1	29,000,000.00
152	Sound System/Toa Wiraless Portable + 2 Mic	TOA	2020	1	10,800,000.00
153	Sound System/Kabel Listrik dan Stand Roll Besar	-	2013	1	625,000.00
154	Sound System/Speaker Dalam Ruangan	BMB	2013	5	9,300,000.00
155	Sound System/Kabel Listrik	Buana Nym	2008	1	330,000.00
156	Sound System/Kabel Microfon (sambungan)	-	2013	1	400,000.00
157	Sound System/Kabel Extension	Eterna NYM 3 x 2.5	2010	1	429,000.00
158	Sound System/Stand Mic Duduk	-	2013	2	936,000.00
159	Sound System/Stand Mic Berdiri	-	2013	2	1,400,000.00
160	Sound System/Kabel Audio Video (AV)	-	2013	1	500,000.00
161	Sound System/Kabel Suara Speaker	-	2013	2	1,750,000.00
162	Sound System/Kabel Microphone	Canare	2008	1	330,000.00
163	Sound System/Microfon (MC) Kabel	-	2013	4	3,500,000.00
164	Wireless/Rak Server 19 Inchi	Abba	2013	1	11,850,000.00
165	Microphone/Microphon	Toa/2M 420	2008	2	990,000.00
166	Camera film/Kamera DSLR	Canon EOS 60D	2014	1	15,000,000.00
167	Camera film/Kamera cccd 29	Sony HVR-A1P	2014	1	33,800,000.00
168	Camera film/Tripod Camera	Excell	2014	3	11,850,000.00
169	Camera film/Kamera cccd 29	Sony HVR-A1P	2014	2	67,600,000.00
170	Tustel/Tustel	Sony	2006	1	8,965,000.00
171	Tustel/Tustel/Kamera Digital	Nikon Cool PIX L820	2013	2	7,400,000.00
172	Dispenser/Dispenser	Royal	2011	1	2,500,000.00
173	Dispenser/Dispenser +Aqua Galon	Sanken	2007	1	1,925,000.00
174	Dispenser/Dispenser	Sanken	2013	1	1,720,000.00
175	Mimbar/Podium/Mimbar	Jati	2013	1	7,850,000.00
176	Handy Cam/Handy kamera	Sony	2007	1	14,850,000.00
177	Handy Cam/Kamera Digital + Tas Kamera + Memory	DSLR Nikon	2011	1	15,400,000.00
178	Handy Cam/Handycam	JVC	2012	1	6,000,000.00
179	Handy Cam/Kamera Digital DSRR	Canon	2012	1	12,850,000.00
180	Tangga/Tangga (Krisbow Tangga Alumunium lipat 6,6 m)	Krisbow	2020	2	8,400,000.00



RENSTRA DISKOMINFO TAHUN 2021-2026

181	Pompa Air Rumah Tangga/Pompa Air (Sanyo Mesin Pompa Air PD-H250B)	Sanyo	2020	1	4,400,000.00
182	Alat Rumah Tangga Lainnya/Papan Struktur	lokal	2010	1	10,000,000.00
183	Alat Rumah Tangga Lainnya/Roof Rack + Tangga Besi	Stainless Stell	2010	1	10,500,000.00
184	Generator Busa/Generator	Yamaha EF	2007	1	12,500,000.00
185	Alat Pembantu Kebakaran/Alat Pemadam Kebakaran		2015	1	150,774,978.00
186	Alat Pembantu Kebakaran/Alat Pemadam Kebakaran		2015	1	468,093,764.00
187	Meja Kerja Pejabat Eselon II/Meja Pimpinan Eselon II	Informa	2013	1	8,750,000.00
188	Meja Kerja Pejabat Eselon II/Meja Kerja Pejabat Eselon II	MALCA	2015	1	4,200,000.00
189	Meja Kerja Pejabat Eselon III/Meja Pimpinan Eselon III	Informa	2013	1	4,840,000.00
190	Meja kerja lain-lain	Informa SM16B	2018	1	10,460,000.00
191	Meja Rapat Pejabat Eselon II/Meja Rapat Pejabat Eselon II	SIEJEN	2015	1	4,200,000.00
192	Kursi Kerja Pejabat Eselon III/Kursi Pimpinan	Informa	2013	1	5,388,000.00
193	Kursi Kerja Pejabat Eselon III/Kursi Direktur	Informa	2015	1	5,170,000.00
194	Kursi Kerja	Indachi D-810 U	2018	4	6,440,000.00
195	Kursi Kerja/Kursi Kerja	Informa	2015	5	22,550,000.00
196	Kursi Kerja/Kursi Pakai Tangan	Pantoni	2005	4	4,300,000.00
197	Kursi Kerja/Kursi Pakai Tangan	Isabel	2005	4	4,300,000.00
198	Kursi Kerja/Kursi Pakai Tangan	Indachi	2007	11	11,825,000.00
199	Kursi Kerja/Kursi Kerja	INDACHI	2015	2	3,000,000.00
200	Kursi Kerja/Kursi Pakai Tangan	Indachi	2011	3	3,300,000.00
201	Kursi Kerja/Kursi Pakai Tangan	Indachi	2009	3	3,300,000.00
202	Kursi Kerja/Kursi Pakai Tangan	Indachi	2006	1	1,075,000.00
203	Kursi Kerja/Kursi Pakai Tangan	Indachi	2006	15	16,125,000.00
204	Kursi Kerja	Informa Roes 162	2018	15	31,552,500.00
205	Kursi Kerja/Kursi Pakai Tangan	Indachi	2005	4	3,720,000.00
206	Kursi Kerja/Kursi Kerja	INDACHI	2015	11	16,500,000.00
207	Kursi Pimpinan	Informa	2018	1	6,660,000.00
208	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II/Meja Rapat	Indachi	2013	1	16,000,000.00
209	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V/Kursi Hadap	Informa	2015	2	4,070,000.00
210	Lemari Buku Untuk Perpustakaan/Lemari Perpustakaan	Panca Futura	2007	1	16,500,000.00
211	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis/Lemari Arsip Untuk	Front Line	2018	2	10,000,000.00



RENSTRA DISKOMINFO TAHUN 2021-2026

	Arsip Dinamis				
212	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis/Lemari Arsip untuk arsip Dinamis Riel & Rick SL-W009 1850 x 900 x 450	Riel & Rick	2019	1	4,500,000.00
213	Video Mixer/Clip on Mike Wareless	Falsen U-775	2014	1	2,500,000.00
214	Video Mixer/Audio Distribusi Amplifier (VDA)	RAYDEN	2014	1	3,500,000.00
215	Video Mixer/Kabel Video RCA to USB	-	2014	1	3,400,000.00
216	Video Mixer/Mixer Audio	Yamaha	2014	1	4,450,000.00
217	Video Mixer/Kabel Video	-	2014	3	3,000,000.00
218	Video Mixer/Kabel Audio	CANARE	2014	1	3,300,000.00
219	Video Mixer/Player dan Recording Mini Divi	Sony	2014	1	37,180,000.00
220	Video Mixer/Mixer Audio Ediroll V8		2014	1	38,000,000.00
221	Video Mixer/Clip on Mike Wareless	Falsen U-775	2014	3	7,500,000.00
222	Video Mixer/Audio Distribusi Amplifier	RAYDEN	2014	1	2,000,000.00
223	Layar Film/Projector/Layar Projector Tripot	Box Ligt	2008	1	1,595,000.00
224	Camera Digital	canon	2016	1	17,000,000.00
225	Peralatan Studio Video Lainnya/Drone + Kamera	Drone DJI Phantom 3 Professional	2016	4	98,657,800.00
226	Pesawat Telephone/Instalasi Telpon	-	2007	1	6,000,000.00
227	Handy Talky (HT)/Handy Talky	ICOM IC-U88	2017	4	9,380,000.00
228	Handy Talky (HT)/Handy Talkie	LUPAX T 550	2014	1	1,800,000.00
229	Handy Talky (HT)/Pesawat RIG	-	2009	2	12,936,666.66
230	Handy Talky (HT)/Handy Talkie	LUPAX T 550	2014	6	10,800,000.00
231	Handy Talky (HT)/Handy Talky	Motorola	2007	1	2,200,000.00
232	Handy Talky (HT)/Handy Talky (Motorola Tipe XiR P6620i)	Motorola	2020	1	12,300,000.00
233	Handy Talky (HT)/Handy Talky (HT)	Alinco	2009	1	3,600,000.00
234	Wireless Amplifier/Wireless Public Address	TOA ZH ZW 800	2010	1	5,590,000.00
235	Wireless Amplifier/Wireless	TOA ZWG810CU	2013	2	20,000,000.00
236	Slide Projector (Lapangan)/Flexibel Standing Screen	Tripot + Logo	2010	1	3,750,000.00
237	TV Monitor/TV Monitor	SAMSUNG	2018	1	6,143,000.00
238	TV Monitor/TV Monitor	SAMSUNG	2015	1	7,000,000.00
239	Stabilizer/UPS/UPS / Stabilizer	PROLINK	2018	1	34,648,000.00
240	Stabilizer/UPS/Stabiliser	Star Volt 2 KVA	2010	1	834,600.00
241	Stabilizer/UPS/UPS / Stabilizer		2013	6	10,800,000.00
242	Stabilizer/UPS/power supply	Lokal	2017	7	3,500,000.00



	(CCTV)				
243	Stabilizer/UPS/UPS	Emerson	2013	1	27,780,000.00
244	Stabilizer/UPS/UPS 5KVA/4KW, 230V, Single Phase, 5U-RacMount, RS-232 Serial Port, Power Management Software	UPS	2016	1	28,273,395.00
245	Meja Kerja/Meja kerja	ORBITREND	2015	3	3,750,000.00
246	Meja Kerja	Lokal	2018	4	7,720,000.00
247	Meja Kerja/Meja kerja lain- lain	Lokal	2015	1	7,095,000.00
248	Meja Kerja/Meja kerja lain- lain	Lokal	2015	1	6,314,000.00
249	Meja Kerja/Meja kerja	ORBITREND	2015	1	1,250,000.00
250	Meja Kerja/meja meeting	Lokal	2015	1	16,291,220.00
251	Meja Kerja/Meja Monitor Operator	Lokal	2015	6	54,423,600.00
252	Meja Kerja/Meja kerja	ORBITREND	2015	1	1,250,000.00
253	Meja Kerja/Meja kerja	ORBITREND	2015	2	2,500,000.00
254	Meja Kerja/Meja kerja lain- lain	Lokal	2015	2	11,770,000.00
255	Meja Kerja/Meja kerja lain- lain	Lokal	2015	3	12,375,000.00
256	Meja Kerja/Meja kerja	ORBITREND	2015	1	1,250,000.00
257	Meja Kerja/Meja kerja lain- lain	Lokal	2015	1	6,875,000.00
258	Serial Scanner/Printer	Brother	2018	1	11,510,000.00
259	Serial Scanner/Printer/Printer Epson LQ-2190	Epson	2019	1	8,232,000.00
260	Serial Scanner/Printer	FUJITSU	2018	2	38,780,000.00
261	Serial Scanner/Printer/Scanner	FUJITSU	2018	1	32,883,000.00
262	Mainframe (Komputer Jaringan)/Mainframe/Server (Server Storage NAS & Harddisk 3.5 Inch 12 TB)	Mainframe/Server Storage NAS	2019	1	370,995,372.00
263	Mainframe (Komputer Jaringan)/Mainframe	DELL EMC	2018	1	126,720,000.00
264	Mini Komputer/Komputer	Lenovo All in One	2015	2	16,470,000.00
265	Mini Komputer/Mini Komputer	APPLE	2015	1	15,000,000.00
266	Mini Komputer/Komputer	Lenovo All in One C360	2015	1	9,425,000.00
267	Mini Komputer/Komputer	Lenovo All in One C360	2015	1	9,425,000.00
268	Mini Komputer	ASUS	2016	1	15,000,000.00
269	Local Area Network (LAN)/Mainframe Access Point (11ac Wave2, Indoor, 2x2 Dual Band, Built-in Antenna, 1xGE Port (Huawei)	(Mainframe Access Point (11ac Wave2, Indoor, 2x2 Dual Band, Built-in Antenna, 1xGE Port) Huawei	2019	20	100,147,639.00



RENSTRA DISKOMINFO TAHUN 2021-2026

270	Local Area Network (LAN)/AcuSense NVR HIKVISION	(AcuSense NVR) HIKVISION	2019	3	33,349,164.00
271	Internet/Loadbalancer / Mikrolik	-	2013	1	3,200,000.00
272	Internet/CDMA Multi Tech M	CDMA Dual Ban	2007	1	2,000,000.00
273	Internet/TV Plasma LED 32	Sony	2012	1	10,000,000.00
274	Internet/PC Pavillion+LCD	GL 31331	2007	1	12,000,000.00
275	Internet/Public Anducement	TOA /ZH 250 S	2007	1	5,000,000.00
276	Internet/Instalasi Server	-	2013	1	16,200,000.00
277	Internet/U P S	-	2011	1	9,000,000.00
278	Internet/Out Door Speaker	TOA /ZH 615 S	2007	1	1,500,000.00
279	Internet/8 Port Switch Dlink	DES 1008	2007	1	500,000.00
280	Internet/Auto Seitch	Paralel	2007	1	1,500,000.00
281	Internet/Wireles Acces Poin Micronet	SO 918 GK	2007	1	14,000,000.00
282	Internet/Manswitch	-	2013	3	4,200,000.00
283	P.C Unit/Komputer	Core I 7	2013	1	15,200,000.00
284	P.C Unit/Komputer All in One	Acer	2013	1	7,000,000.00
285	P.C Unit/PC Unit	Lenovo	2017	1	13,600,000.00
286	P.C Unit/Personal Komputer Lain-lain	HP	2015	2	30,000,000.00
287	P.C Unit/Komputer All in	Lenovo	2014	3	44,850,000.00
288	P.C Unit/PC Unit	Lenovo	2015	1	12,430,000.00
289	P.C Unit/Komputer All in	I-Mac Apple	2015	1	30,000,000.00
290	P.C Unit/PC Unit	Lenovo	2015	1	12,430,000.00
291	P.C Unit/Komputer All in	Lenovo	2014	1	14,950,000.00
292	P.C Unit	Lenovo	2017	1	13,600,000.00
293	P.C Unit/PC Unit	Lenovo	2015	1	12,430,000.00
294	P.C Unit/PC Unit	Lenovo	2015	1	12,430,000.00
295	P.C Unit/PC Unit	Lenovo	2015	2	24,860,000.00
296	P.C Unit/PC Unit	Lenovo	2015	1	12,430,000.00
297	P.C Unit/Komputer SMS Gateway	-	2014	1	14,200,000.00
298	P.C Unit/Personal Komputer Lain-lain	APPLE	2015	3	90,000,000.00
299	P.C Unit/PC Unit	Lenovo	2015	1	12,430,000.00
300	P.C Unit/Komputer Editing	-	2014	1	34,300,000.00
301	P.C Unit/PC Unit	Lenovo	2017	1	13,600,000.00
302	P.C Unit/Komputer All in One	Lenovo	2013	1	13,000,000.00
303	P.C Unit/PC Unit	Lenovo	2015	1	12,430,000.00
304	P.C Unit/Komputer P.4	Acer	2013	1	7,400,000.00
305	P.C Unit/Personal Komputer Lain-lain	ACER	2010	5	91,841,751.00
306	P.C Unit/HP Pavillion All in One 24-R011D [3JU09AA]	HP Pavillion All in One	2019	2	28,528,000.00
307	P.C Unit/PC Unit	HP	2018	3	41,830,500.00
308	P.C Unit/PC Unit	HP	2018	1	13,943,500.00



RENSTRA DISKOMINFO TAHUN 2021-2026

309	P.C Unit/Komputer P.IV + Monitor LCD 15 Inch + Print Inkjet	Acer	2012	1	6,100,000.00
310	P.C Unit/PC Unit	Lenovo	2015	1	12,430,000.00
311	PC Unit/Mini PC	Asus	2020	30	117,300,000.00
312	P.C Unit/PC Unit	Lenovo	2015	1	12,430,000.00
313	P.C Unit/Komputer P.IV All in One + Print Deskjet	Hp Omni 220 pc	2012	2	30,000,000.00
314	P.C Unit/Komputer All in	Lenovo	2014	1	6,900,000.00
315	P.C Unit/PC Unit	Lenovo	2017	1	13,600,000.00
316	PC Unit/PC Unit Lenovo AIO	Lenovo	2020	1	13,750,000.00
317	P.C Unit/PC Unit	Lenovo	2015	1	12,430,000.00
318	P.C Unit/Komputer	Lenovo	2013	1	20,365,000.00
319	P.C Unit/Komputer PC Acer Processor	Acer E 5300	2009	1	9,000,000.00
320	P.C Unit/PC Computer Network HP	PC Computer Network HP	2019	2	100,000,000.00
321	P.C Unit/Komputer	Relion	2007	1	12,100,000.00
322	P.C Unit/Komputer All in One (2.7GHz,6 Cache), 4GB DDR3, 1TB Sata 7200 RPM, Graphics 2Gb, 23.8" Multi Touch Screen LED, Wireless Keyboard dan Mouse	Lenovo	2016	10	156,191,550.00
323	Lap Top/Lenovo Legion Y5330 -15inch (81LB006GID)	Lenovo Legion	2019	1	19,599,000.00
324	Lap Top/Notebook	HP	2014	2	30,000,000.00
325	Lap Top	ASUS	2016	1	15,000,000.00
326	Lap Top	Apple	2017	1	14,994,000.00
327	Lap Top/HP Probook (x360 440 G1)	HP Probook	2019	1	19,794,000.00
328	Note Book/Notebook Lenovo V330 (i5,4GB,1TB,AMD 2GB,Win10Pro,14inch)	Lenovo	2019	15	173,368,500.00
329	Note Book/Notebook	Asus	2013	2	23,400,000.00
330	Note Book/Komputer Notebook	Lenovo G40-70	2015	1	7,965,000.00
331	Note Book/Note Book	APPLE NOTEBOOK PRO	2015	2	30,000,000.00
332	Note Book/Notebook Asus ROG	ASUS ROG	2020	1	23,650,000.00
333	Note Book	Asus	2018	1	19,002,000.00
334	Note Book/Note Book	Acer	2012	2	20,000,000.00
335	Note Book	Apple (Macbook Pro With Touch Bar)	2018	1	30,072,000.00
336	Note Book/Note Book	APPLE	2018	1	19,937,000.00
337	Note Book/Note Book	HP	2015	1	15,000,000.00
338	Note Book/Note Book Table Apple		2012	1	10,422,175.33



RENSTRA DISKOMINFO TAHUN 2021-2026

339	Note Book/Komputer Table + Pembungkus Kulit Ipad + Kabel Kon	Apple I Pad 2	2011	1	19,250,000.00
340	Note Book/Note Book		2009	1	14,520,000.00
341	Note Book/Notebook Video Network Apple	Macbook Pro Apple (Notebook Video Network)	2019	2	116,600,000.00
342	CPU (Peralatan Personal Komputer)/CPU Komputer	Lenovo	2014	1	4,300,000.00
343	Monitor/Monitor LED Samsung UD46E-B	Samsung	2019	3	150,000,000.00
344	Monitor/Monitor Komputer	ACER Full HD	2014	1	2,200,000.00
345	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer Laserjet	Canon	2016	1	1,800,000.00
346	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer Merk Canon G-3010	Canon	2020	1	4,125,000.00
347	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	HP/EPSON	2015	1	4,500,000.00
348	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	HP/EPSON	2015	1	4,500,000.00
349	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer Inkjet A3	HP	2014	1	4,300,000.00
350	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	HP/EPSON	2015	1	4,500,000.00
351	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer Merk Epson L-4150	Epson	2020	4	20,240,000.00
352	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	CANON	2018	1	3,720,500.00
353	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	CANON	2018	1	3,720,500.00
354	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	Canon	2013	1	4,200,000.00
355	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer Merk Epson L-1455 (A3)	Epson	2020	2	26,400,000.00
356	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	HP	2014	2	16,000,000.00
357	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	HP Inkjet	2013	1	550,000.00
358	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	EPSON GAJI	2015	1	10,000,000.00
359	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	EPSON	2015	2	9,000,000.00
360	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	HP Laser	2010	1	5,604,317.00
361	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	2017	1	3,400,000.00
362	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	2017	1	3,400,000.00
363	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	HP/EPSON	2015	1	4,500,000.00
364	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	2017	1	3,400,000.00



	Komputer)				
365	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	HP D1515 Copyscan Inkjet Deskj	2015	2	1,850,000.00
366	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	HP/EPSON	2015	3	13,500,000.00
367	Scanner (Peralatan Personal Komputer)/Scanner	HP B2 CH	2013	2	8,400,000.00
368	Scanner (Peralatan Personal Komputer)/Scanner	HP	2010	1	3,515,417.00
369	External/Hardisk External	Toshiba	2013	1	1,200,000.00
370	External/Hardisk External	Toshiba	2013	4	4,800,000.00
371	Server/Komputer Server	HP	2017	1	275,000,000.00
372	Server/Switch Server Huawei	Switch Server Huawei	2019	8	999,475,666.00
373	Server/Server + Biaya Adm Umum	IBM	2013	1	110,188,000.00
374	Server/Core Switch Server Huawei	Core Switch Server Huawei	2019	1	1,585,091,213.00
375	Server/Server Hyper Converge (Sangfor, HPE Aruba)	Server Hyper Converge Sangfor, HPE Aruba	2019	1	3,825,000,000.00
376	Server/Server Video Network	HP	2017	1	242,000,000.00
377	Router/Modul Jaringan FO (Optical Transceiver-Huawei)	(Optical Transceiver) Huawei	2019	8	115,726,161.00
378	Router/Router 13 Ports 10/100/1000 Ethernet, 2Gb RAM, Micro SD Card Slot, a beeper and Serial Port	Router 13 Ports	2016	1	6,087,147.00
379	Hub/Hub Switch 24 Port,10/100/1000 Mbps,Unmanaged, Desktop Switch, Rack Mountable	Hub Switch	2016	1	4,440,423.00
380	Modem/Perangkat Jaringan	D link	2010	1	8,298,035.00
381	Acces Point	Cisco Meraki	2020	50	275,000,000.00
382	Acces Point	Unifi AC Pro	2020	40	148,000,000.00
383	Peralatan Jaringan/Antena Omni (Pelembar)	-	2014	10	15,700,000.00
384	Peralatan Jaringan/Pemasangan Hotspot Area	-	2014	10	15,000,000.00
385	Peralatan Jaringan/Antena Sektoral (Repiter)	-	2014	30	42,900,000.00
386	Peralatan Jaringan/UPS (Uninterruptible Power Supply)	-	2014	10	7,500,000.00
387	Peralatan Jaringan/RB Mikrotik	-	2014	10	19,800,000.00
388	Peralatan Jaringan/Peralatan Jaringan Komputer	0	2014	1	159,000,000.00
389	Peralatan Jaringan/Tiang Besi	-	2014	10	8,800,000.00
390	Peralatan Jaringan/Router	-	2014	10	17,600,000.00



RENSTRA DISKOMINFO TAHUN 2021-2026

391	Peralatan Jaringan/Antena	-	2007	1	2,000,000.00
392	Kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk,speaker)/Kartu Chip SMS Gateway	-	2014	1	2,900,000.00
393	Closed Circuit Television (CCTV)/CCTV	Samsung	2017	7	335,074,250.00
394	Closed Circuit Television (CCTV)/CCTV	Avigilon	2017	2	858,828,000.00
395	Closed Circuit Television (CCTV)/CCTV IP Based Self Learning Analytic 2MP Full HD	CCTV HIKVISION	2019	20	3,720,000,000.00
396	Closed Circuit Television (CCTV)/NVR HIK Vision	NVR	2018	2	18,000,000.00
397	Closed Circuit Television (CCTV)/Box Panel	Custom	2018	32	112,000,000.00
398	Closed Circuit Television (CCTV)	komlet	2016	1	2,606,822,000.00
399	Closed Circuit Television (CCTV)	AVIGILON	2018	20	3,820,060,000.00
400	Closed Circuit Television (CCTV)/CCTV	Avigilon	2017	10	1,743,884,750.00
ASET LAINNYA				138	2,617,788,288.44
- BARANG HILANG				2	14,000,000.00
401	TV Monitor/TV Monitor	SAMSUNG	2015	2	14,000,000.00
- TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA				34	475,805,500.09
402	Sepeda Motor/Motor	Suzuki A100	1980	1	480,000.00
403	Sepeda Motor/Motor	Suzuki FD 125	2005	1	12,335,000.00
404	Rol Meter/Kabel RG 7/8 Andrew	RG 7/8	2005	1	6,000,000.00
405	Rol Meter/Antena Mounting n Lamp	RG 7/8	2005	1	1,750,000.00
406	Papan Pengumuman/papan informasi	lokal	2016	1	1,200,000.00
407	Video Cassette/Casette Recorde & CD	Danon	2005	1	9,500,000.00
408	Telephone Hybrid/Hybrid Dan Linphon	ITB 302	2005	1	20,000,000.00
409	Microphone/Wireless MIC/Micropone (MIC)	Shenheizer/Type HD 33	2005	2	20,000,000.00
410	Microphone/Wireless MIC/Micropone (MIC)	Surf	2004	1	2,750,000.00
411	Microphone Connector Box/Box/ Kotak Pemancar	Lokal \ 19"	2005	1	6,000,000.00
412	Off Air TV Monitor/TV Monitor L.Datar	JVC	2005	1	3,000,000.00
413	Micro Film/Audio Processor Stereo	AEV Starlaight 2	2005	1	20,000,000.00
414	Mixer PVC/Mixer	6 Stereo 2 Linphone	2005	1	49,080,500.00
415	Mixer PVC/Mixer	BSE Lokal (PR 833)	2004	1	3,500,000.00
416	Head Set/Handphone Flexi	Nokia 2112	2005	1	3,500,000.00
417	Head Set/Head Phone	Sheneiser HD	2005	3	5,000,000.09



RENSTRA DISKOMINFO TAHUN 2021-2026

418	Head Set/Phone Flexi Pix	Sanex SC 3710	2005	1	3,500,000.00
419	Handy Talky (HT)/Handy Talky (HT)	Icom	2009	1	3,600,000.00
420	Slide Projector (Lapangan)/Spiliter	Spiliter 1006	2005	1	3,750,000.00
421	Self Supporting Tower/Tower Lengkap Labran	Lokal Segi 4	2005	1	46,000,000.00
422	Audio Processor Am/Compressor limit	Drawner	2005	1	10,700,000.00
423	FM Monitor/Radio Monitor	Yamaha Tuner Digital AM/FM TX-492 RDS	2005	1	5,000,000.00
424	Unit Transceiver VHF Portable/Portable phone	fagitel 558	2005	1	3,500,000.00
425	Unit Transceiver VHF Stationary/Antena	MS 1 : 6 BARS	2005	1	45,000,000.00
426	Unit Antena Transceiver HF Stationary/Pemancar FM Micro	Pyramide	2005	1	40,000,000.00
427	Stabilizer/UPS/ FM Power Amplifier	Pyramide	2005	1	109,160,000.00
428	Transceiver/Receiver Broadcasting	AVR lokal	2005	1	15,500,000.00
429	P.C Unit/Komputer	philips/ Zirex	2005	2	11,000,000.00
430	P.C Unit/Komputer	Layar Monitor Datar/Prolin LCD 2300XL/23,4 Mono	2005	1	7,500,000.00
431	P.C Unit/Komputer	Layar Monitor Datar/Prolin LCD 2300XL/23,4 Mono	2005	1	7,500,000.00
- BARANG RUSAK BERAT				96	1,652,670,288.35
432	Sepeda Motor/Motor	Yamaha Sigma E	1997	1	2,450,000.00
433	Sepeda Motor/Motor	Suzuki A100	1996	1	1,062,500.00
434	Mobil Unit Penerangan Darat/Mobil	Mitsubishi Kuda GLS	2003	1	143,650,000.00
435	Alat Kantor Lainnya/LCD, TV 26	LG 26 C4R	2007	1	10,000,000.00
436	Alat Kantor Lainnya/LCD Projector Infokus	Nec/NP 100-200	2008	1	8,745,000.00
437	Alat Kantor Lainnya/Running Teks Billboard	-	2009	2	35,000,000.00
438	Meja Rapat/Meja Rapat	Victor	2007	1	12,340,000.00
439	A.C. Split/AC Split	Panasonic	2007	2	15,400,000.00
440	A.C. Split/Air conditioner AC	Mitsubishi	2005	3	12,000,000.00
441	A.C. Split/AC Split	Mitsubishi	2005	1	4,000,000.00
442	A.C. Split/AC Split	LG	2007	1	3,970,000.00
443	Amplifier/Spicer	Clipton	2006	1	6,375,000.00
444	Amplifier/Amplifier	Headcabinet	2006	1	4,850,000.00
445	Amplifier/Gitar Listrik	CORT/X6	2006	1	4,900,000.00
446	Amplifier/Amplifier	TOA/ZA 1061	2006	1	1,852,000.00
447	Amplifier/Power Suplai	Phonik Mac2500	2006	1	1,900,000.00
448	Amplifier/Spicer	Clipton	2006	1	6,375,000.00



RENSTRA DISKOMINFO TAHUN 2021-2026

449	Amplifier/Amplifier	Mixer	2006	1	6,900,000.00
450	Loudspeaker/Loudspeker	TOA 6255	2006	1	545,000.00
451	Loudspeaker/Loudspeker	Toa ZH/5025	2006	2	1,348,000.00
452	Loudspeaker/Loudspeker	TOA 6255	2006	1	545,000.00
453	Sound System/Kabel Suara	Standar	2008	1	990,000.00
454	Sound System/Sound System	BMB/Berdiri	2006	2	16,885,000.00
455	Sound System/Kabel Microphone	Canare	2008	1	330,000.00
456	Microphone/Microphon	Spider	2008	2	900,000.00
457	Tustel/kamera Digital (Tustel)	Canon/A720	2008	2	10,948,850.00
458	Dispenser/Dispenser	Sanken	2013	1	1,720,000.00
459	Handy Cam/Handycam	SONY DCR HC 62	2010	1	3,997,500.00
460	Handy Cam/Handycam	Sony 800 K	2006	1	8,910,000.00
461	Audio Cassette Recorder/VCD Player DVD	Pioner	2004	1	2,075,000.00
462	Handy Talky (HT)/Handy Talky (HT)	Icom	2009	1	2,800,000.00
463	Handy Talky (HT)/Handy Talky (HT)	Icom	2009	1	3,600,000.00
464	Handy Talky (HT)/Handy Talky (HT)	Icom	2009	1	3,600,000.00
465	Handy Talky (HT)/Handy Talky (HT)	Alinco	2009	1	3,600,000.00
466	Handy Talky (HT)/Pesawat RIG	-	2009	1	6,468,333.33
467	Unit Tranceiver Ssb Stationery/Pengolahan Data	-	2007	1	40,000,000.00
468	Unit Tranceiver Ssb Stationery/Video dan Photo Perdagangan, Pariwisata Investasi	-	2007	1	40,800,000.00
469	Unit Tranceiver Ssb Stationery/Aplikasi City G	-	2007	1	139,000,000.00
470	Unit Tranceiver Ssb Stationery/Aplikasi Plasma	-	2007	1	88,000,000.00
471	Unit Tranceiver Ssb Stationery/Perangkat	Model 2 Plasma	2007	1	63,020,000.00
472	Unit Tranceiver Ssb Stationery/Integrasi Jaringan Penayangan Makassar	-	2007	1	40,000,000.00
473	Unit Tranceiver Ssb Stationery/Perangkat	Kios Interaktif	2007	1	102,000,000.00
474	Stabilizer/UPS/UPS Stabiliser	Fleser/60 WA	2008	4	2,974,400.00
475	Stabilizer/UPS/Unintemuptible Power Supply (UPS)	LIEBERT	2015	4	2,998,964.00
476	Stabilizer/UPS/Unintemuptible Power Supply (UPS)	LIEBERT	2015	1	749,741.00
477	Stabilizer/UPS		2016	1	64,438,000.00
478	Stabilizer/UPS/UPS	-	2012	6	12,000,000.00
479	Stabilizer/UPS/UPS	Pro Link	2010	6	34,600,000.02
480	Internet/Perangkat Wartel	Q Phone TUT2K	2007	1	5,000,000.00
481	Internet/Multi Fungction Print	INK JET 4355	2007	1	6,000,000.00



RENSTRA DISKOMINFO TAHUN 2021-2026

482	Internet/DVD Player Home theater System	LG LH T360ME	2007	1	20,000,000.00
483	Internet/Perangkat Faximile	Faximile	2007	1	4,000,000.00
484	Internet/UPS APC	1500 KVA 1500	2007	1	13,000,000.00
485	Internet/Warnet Billisert	Explorer Stan	2007	1	3,000,000.00
486	Internet/Printer Pos	Epson LX300	2007	1	7,000,000.00
487	Internet/Perangkat Instalasi	-	2007	1	1,500,000.00
488	P.C Unit/Komputer	Relion	2007	5	49,775,000.00
489	P.C Unit/Komputer	Relion	2008	1	7,000,000.00
490	P.C Unit/Komputer	Relion	2007	1	13,310,000.00
491	Lap Top/Note Book / Laptop	HP Compaq 6530 S4	2010	1	9,295,000.00
492	Lap Top/Note Book (Lap Top)	Byon/M31 WS	2008	1	9,922,000.00
493	Note Book/Note Book	Toshiba	2006	1	19,965,000.00
494	Monitor/Layar Sentuh Monitor Display dan Jaringan Komputer	-	2008	1	227,700,000.00
495	Monitor/Layar Sentuh Monitor Display dan Jaringan Komputer	-	2008	1	227,700,000.00
496	Monitor/CCTV	Montero	2012	1	37,300,000.00
497	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	HP Inkjet Copy Scan	2009	1	1,600,000.00
498	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	Canon	2006	1	6,490,000.00
499	Modem/Modem External	-	2007	1	1,500,000.00
- BARANG DIKUASAI PIHAK LAIN				6	475,312,500.00
500	Station Wagon	mazda	2009	1	150,000,000.00
501	Multi Purpose Vehicle (MPV)/Mobil	Daihatsu Terios	2011	1	199,550,000.00
502	Sepeda Motor/Motor	Yamaha-YT115	1997	1	2,450,000.00
503	Sepeda Motor/Motor	Honda Win	1994	1	1,500,000.00
504	Sepeda Motor/Motor	Suzuki A100	1996	1	1,062,500.00
505	Mobil Unit Penerangan Darat/Mobil	Mitsubishi Maven GLX	2006	1	120,750,000.00
EXTRA COUNTING ASSET(ECA)				224	3,864,450.00
506	Kursi Besi/Metal/Kabel Audio Vidio	Procom 3 Ser	2008	1	222,750.00
507	Microphone/Microphone	TOA ZM 260	2010	1	110,500.00
508	Alat Rumah Tangga Lainnya/Slang	San-san/OD	2008	1	232,700.00
509	Alat Pemadam/Portable/Alat Pemadam Kebakaran	Hooseki	2010	1	188,500.00
510	Peralatan Jaringan/Konektor BNC dan RCA		2014	45	450,000.00
511	Peralatan Jaringan/POE (Power Over Ethernet)		2014	10	945,000.00
512	Peralatan Jaringan/Konektor BNC dan RCA		2014	1	10,000.00
513	Peralatan Jaringan/RJ 45 (konektor)		2014	100	175,000.00



514	Peralatan Jaringan/pigtail		2014	10	990,000.00
515	Peralatan Jaringan/Konektor BNC dan RCA		2014	1	10,000.00
516	Peralatan Jaringan/Konektor BNC dan RCA		2014	1	10,000.00
517	Peralatan Jaringan/Konektor BNC dan RCA		2014	46	460,000.00
518	Peralatan Jaringan/Konektor BNC dan RCA		2014	1	10,000.00
519	Peralatan Jaringan/Konektor BNC dan RCA		2014	5	50,000.00
Jumlah				1601	32,879,975,206.43

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar yang diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Dinas ini telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. adapun capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3.1. Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Makassar Tahun 2015-2016 (Tabel TC 23)

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Pegawai Diskominfo Terhadap Pelayanan Sekretariat					85%	85%	100%	100%		85%	95,34%	92,59%	94,69%		100%	112%	93%	95%
2	Jumlah Unit Ruang Public yang terfasilitasi akses wi-fi (Internet)					10	10	10	10		7	20	10	10		70%	200%	100%	100%
3	Cakupan Infrastruktur Kelancaran arus Informasi							50%	70%				100%	100%				200%	143%
4	% Laporan Kinerja SKPD Yang Terpublikasikan					10%	10%	80%	100%		9,25%	17,65%	43,75%	74,5%		93%	177%	55%	75%
5	% SKPD Yang Menerapkan Elektronik Government yang Terintegrasi					5%	5%	50%	80%		33%	1,96%	19,60%	52,9%		667%	39%	39%	66%
6	% SKPD Yang Menerapkan Data Elektronik yang Terintegrasi							30%	50%				64,70%	64,70%				216%	129%
7	SKPD Yang Dokument perencanaan dan laporan kinerjanya di publikasikan di media					100%	100%	100%	100%		100%	100%	109,80%	100%		100%	100%	110%	100%
8	% Lembaga media massa dan kelompok informasi masyarakat yang dibina					20%	20%				20%	20%				100%	100%		
9	%Operasional "War Room"							99%	99,73%				99,72%	99,72%				101%	100%
10	% Data dan Laporan yang disusun Tepat Waktu							100%	100%				100,00%	100%				100%	100%
11	% Komunikasi Rahasia dan Daerah Yang di Amankan							30%	50%				39,21%	100%				131%	200%



Dari table 2 .3 .1 tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan target kinerja menunjukkan rasio yang secara umum telah sesuai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Kecuali pada indikator yang berkaitan dengan:

1. Persentase Laporan Kinerja SKPD yang terpublikasikan, hal ini disebabkan oleh:
 - a. Belum optimalnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
 - b. Perlunya regulasi tata Kelola informasi pada masing-masing PPID Pembantu;
 - c. Penguatan fungsi UPTD War Room; dan
 - d. Pembentukan Forum Data
2. Persentase SKPD yang menerapkan elektronik Government yang terintegrasi, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran Sebagian SKPD untuk berpartisipasi dalam mendukung Program tersebut.

Dari gambaran Tabel 2.3.2 tentunya harus mendapatkan perhatian dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program kegiatan dan pencapaian target pada jangka waktu perencanaan selanjutnya.

Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode 2014 – 2019 secara total pertahun pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar adalah sebagaimana terinci pada Tabel 2.3.2

Tabel 2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2015-2019 (Tabel TC 24)

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pelayanan administrasi perkantoran	1.933.404.800	1.943.404.800	2.165.694.440	3.176.643.300	2.867.385.200	1.713.503.869	1.743.503.869	1.745.559.435	2.645.559.435	2.628.963.060	88,63%	89,71%	80,60%	83,28%	91,69%	233.495.100	228.864.798
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	346.624.600	356.624.600	1.017.327.050	1.591.365.060	971.520.500	289.180.690	299.180.690	575.157.832	795.157.832	750.191.925	83,43%	83,89%	56,54%	49,97%	77,22%	156.223.975	115.252.809
3	Peningkatan disiplin aparatur	32.500.000	42.500.000	59.500.000	69.500.000	75.000.000	27.500.000	37.500.000	59.500.000	69.500.000	71.000.000	84,62%	88,24%	100,00%	100,00%	94,67%	10.625.000	10.875.000
4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	65.000.000	75.000.000	150.000.000	165.000.000	219.200.000	20.349.000	30.349.000	85.246.500	95.246.500	123.279.716	31,31%	40,47%	56,83%	57,73%	56,24%	38.550.000	25.732.679
5	Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	476.800.000	486.800.000	505.000.000	507.000.000	377.000.000	416.200.000	426.200.000	501.850.000	503.850.000	345.700.750	87,29%	87,55%	99,38%	99,38%	91,70%	24.950.000	17.624.813
6	Pengembangan pos dan telekomunikasi	1.509.982.600	1.519.982.600	3.359.399.800	-	-	1.119.782.600	1.129.782.600	3.263.096.400	-	-	74,16%	74,33%	97,13%	---	---	377.495.650	279.945.650
7	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	5.927.695.000	5.937.695.000	15.274.638.500	16.007.486.600	13.363.766.000	1.928.581.000	1.938.581.000	14.566.596.201	15.644.603.596	12.116.688.419	32,54%	32,65%	95,36%	97,73%	90,67%	1.859.017.750	2.547.026.855
8	Pengembangan sistem informasi dan komunikasi	6.818.225.500	6.828.225.500	5.746.611.300	1.411.496.300	5.283.674.000	4.710.968.500	4.820.968.500	4.169.209.600	1.383.457.758	4.402.524.000	69,09%	70,60%	72,55%	98,01%	83,32%	383.637.875	77.111.125
9	Kerjasama informasi dan mas media	2.477.692.500	2.487.692.500	4.401.165.700	4.067.306.700	2.667.055.500	2.302.230.500	2.314.230.500	4.332.536.300	2.784.074.700	2.184.937.400	92,92%	93,03%	98,44%	68,45%	81,92%	47.340.750	29.323.275
10	Pemberdayaan kelembagaan media massa dan masyarakat	1.572.385.000	1.582.385.000	565.839.000	-	-	1.250.878.200	1.270.878.200	416.683.000	-	-	79,55%	80,31%	73,64%	---	---	393.096.250	312.719.550
11	Persandian dan Pengamanan informasi	-	-	117.250.000	523.852.500	1.019.938.500	-	-	113.756.100	518.933.850	947.729.582	---	---	97,02%	99,06%	92,92%	254.984.625	236.932.396
12	Pengembangan data dan informasi	-	-	385.700.000	1.377.374.800	1.209.935.400	-	-	381.550.000	1.279.937.400	1.120.475.100	---	---	98,92%	92,93%	92,61%	302.483.850	280.118.775
13	Optimalisasi Operation room smart city kota Makassar	-	-	-	6.860.490.000	10.929.090.900	-	-	-	6.297.034.000	9.436.179.460	---	---	---	91,79%	86,34%	2.732.272.725	2.359.044.865
Total Anggaran		21.160.310.000	21.260.310.000	33.748.125.790	35.757.515.260	38.983.566.000	13.779.174.359	14.011.174.359	30.210.741.368	32.017.355.071	34.127.669.412	65,12%	65,90%	89,52%	89,54%	87,54%	4.455.814.000,00	5.087.123.763,25



Sedangkan untuk tahun 2020, dikarenakan Pemerintah Kota Makassar belum mempunyai Kepala Daerah sehingga Renstra SKPD tidak di susun, namun tetap menjalankan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3.3 Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Makassar Tahun 2020

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target dan Realisasi		Rasio Capaian
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Pegawai Diskominfo Terhadap Pelayanan Sekretariat	100%	82%	82%
2	Indeks Muturitas tata Kelola teknologi Informasi dan Komunikasi	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
3	Persentase Informasi yang disebarluaskan ke Masyarakat	100%	89%	89%
4	Persentase Ketersediaan Sistem data dan statistik yang terintegrasi	100%	100%	100%
5	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	Level I	Level I	100%
6	Persentase Operasional War Room	90%	89%	99%

Tabel 2.3.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio
		2015	2015	2015
1	2	3	8	13
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	3.055.643.125	2.496.785.594	81,71%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	756.164.696	624.494.680	82,59%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	377.000.000	345.700.750	91,70%
4	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	13.363.766.000	12.116.688.419	90,67%
5	Program Pengembangan Aplikasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	11.321.000.000	10.910.182.000	96,37%
6	Program Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Publik	2.900.124.000	2.591.176.000	89,35%
7	Program Pengolahan Data Statistik dan Penyajian Informasi	563.345.000	455.554.000	80,87%



8	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (PPIPD)	26.000.000	24.000.000	92,31%
Total Anggaran		32.363.042.821	29.564.581.443	91,35%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang akan di hadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 5 Tahun akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Keinginan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik, sehingga ketersediaan aplikasi pendukung sangat diperlukan.
2. Era Society 5.0 mengharuskan kesiapan stakeholder dalam mewujudkan smartcity dengan dukungan data statistik yang akurat.
3. Kurangnya pemahaman seluruh stakeholder, pimpinan dan staf, tentang peran strategis e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Ancaman terhadap keamanan informasi dan penyalahgunaan data semakin tinggi.

Sedangkan beberapa peluang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Lima tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat, dan mudah diakses secara cepat dan murah.
2. Berkembangnya aplikasi open source yang lebih ekonomis, dan semakin banyak aplikasi e-government yang dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah lain yang bisa diadopsi.
3. Terdapat komitmen dan dukungan kepala daerah tentang penerapan e-government dan pengembangan data statistik sektoral.
4. Menguatnya kebijakan SPBE secara nasional (adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) perlu dimanfaatkan Pemerintah Daerah.
5. Meningkatnya tren insiden siber sehingga perlu adanya penguatan pada bidang siber dan keamanan informasi.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan berkaitan dengan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tugas pokok dan fungsi di jabarkan sebagai berikut:

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Perlunya penambahan sumber daya manusia Pegawai Negeri sehubungan memasuki purna bakti
 - 2) Perlunya formasi dan pengisian jabatan perencanaan minimal 5 orang
 - 3) Perlunya peningkatan kompetensi dan kemampuan atas sumber daya manusia
 - 4) Usulan yang terkait program subbagian dan bidan pada kebutuhan dana yang sangat urgen belum terpenuhi
 - 5) Adanya pergantian pejabat terkait mutasi jabatan sehingga perlu mempelajari kembali dokumen perencanaan yang ada sebelumnya sehingga mengakibatkan pejabat baru belum menguasai sepenuhnya dokumen sebelumnya
 - 6) Sarana digitalisasi pengarsipan belum tersedia
 - 7) Format permintaan data pada saat rekonsiliasi seringkali terjadi perubahan
 - 8) Desiminasi terkait pelaporan evaluasi kinerja pada proses pengumpulan data masih lambat
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sumber daya manusia aparatur pemerintah yang tidak berlatarbelakang pendidikan akuntansi mengakibatkan pemahaman terhadap proses akuntansi tidak terlaksana
 - 2) Masih banyak entitas pelaporan yang menganggap bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah dokumen rahasia



- 3) Banyak peraturan keuangan seringkali menyulitkan bagi aparaturnya untuk mengimplementasikannya. Belum tuntas pemahaman mengenai aturan yang terdahulu, disusul lagi dengan peraturan baru.
- 4) Perlunya sosialisasi serta sinkronisasi pada rekanan dan pemeriksa (inspektorat) agar adanya kesepahaman selanjutnya diadakan peningkatan kompetensi terhadap pencairan keuangan
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
 - 1) Belum terpenuhinya kebutuhan jabatan pelaksana sehingga yang terisi hanya 40 %
 - 2) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan fungsinya masih minim untuk pemenuhan anggaran dan pelatihan yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan
 - 3) Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan masih terbatas dari anggaran yang telah ditetapkan dan spesifikasi kendaraan yang dibutuhkan harganya sangat mahal
 - 4) Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak operasional/lapangan untuk pengenaan pajaknya tidak menentu atau berfluktuasi dan ketidaktaatan pemegang kendaraan untuk melaporkan pada saat jatuh tempo pajak kendaraan yang dikuasainya
 - 5) Pemenuhan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan kantor terhadap pemenuhan anggaran sangat terbatas dan atas pemenuhan bangunan harus persetujuan dinas pekerjaan umum melalui sekretaris daerah Kota Makassar
 - 6) Penyediaan bahan logistik kantor pada untuk harga pada aplikasi tidak sesuai dengan harga dipasaran mengingat harga dipasaran berfluktuasi dan beberapa item yang akan dibelanjakan tidak terdapat di Aplikasi
2. Pada program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdapat Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan permasalahan sebagai berikut :



- a. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terjadi masalah Inkonsistensi dan tidak adanya kontinuitas terkait visi penatalaksanaan dan pengawasan E-Government di kota Makassar sehingga beberapa pelaksanaan e-gov di SKPD di kota Makassar masih berdasarkan pemahaman masing – masing, serta Minimnya pelatihan dalam peningkatan Kemampuan SDM dimana pelaksanaan E-Government belum terpenuhi serta Lembaga yang seharusnya menaungi belum dibuat
- b. Pengelolaan Pusat Data di Pemerintah Kota Makassar belum maksimal, Integrasi dan pusat data belum terlaksana dengan baik dan Minimnya anggaran dan SDM untuk pelaksanaan pengelolaan pusat data.
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik terhadap data - data yang dimiliki oleh pemerintah kota makassar masih berdasarkan basis platform yang berbeda – beda, Sulit mengintegrasikan data yang berasal dari platform yang berbeda – beda, dan Kurangnya sumber daya manusia terkait pengembangan tentang koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik
- d. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik terhadap Aplikasi yang telah dibuat seringkali berbeda platform sehingga sulit dilakukan pengintegrasian, Belum ada SOP untuk pengembangan aplikasi di pemerintah kota Makassar dan beberapa SKPD melaksanakan pengembangan aplikasi dengan tidak melakukan koordinasi dengan diskominfo
- e. Sistem penghubung layanan pemerintah di kota makassar belum terlaksana dengan baik dan sesuai kemampuan pemerintah kota makassar dan kebutuhan masyarakat pada khususnya, Suprastruktur berupa regulasi masih kurang dalam mendukung Sistem Pemnghubung berbasis teknologi informasi dan belum ada wadah serta belum detailnya tata kelola tentang penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah
- f. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas dengan Minimnya koordinasi dengan lembaga daerah atau kementerian terkait, Minimnya anggaran untuk pelaksanaan dan pengembangan terkait pengelolaan kota cerdas, dan belum terpenuhinya wadah untuk pelaksanaannya



- d. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik pokok masalahnya Masih kurangnya kreasi konten media yang dikelola, masalahnya terdapat pada www.makassarkota.go.id, buletin Makassar Info dan media sosial semakin kompetitif dan kreatif sesuai kebutuhan pulik di era digital, maka



diperlukan pengembangan kompetensi SDM dengan akar masalah Belum dilajukannya perbandingan pengelolaan media di daerah lain maka perlu diadakan studi banding agar bisa dijadikan inspirasi pengembangan konten informatif dan terkini

- e. Pengelolaan Media Komunikasi Publik pokok masalah pada Mengingat pentingnya publikasi terkait program dan visi misi pemerintah sehingga dibutuhkan dukungan publikasi semua baik media cetak, tv, radio, on line dll dengan masalah Kerjasama dengan media cetak, elektronik dan media online masih belum maksimal sehingga akar masalahnya adalah kerjasama dengan media masih sangat perlu ditambahkan baik media cetak tv, radio, online dan lain sebagainya
- f. Pelayanan Informasi Publik mempunyai masalah pokok Masih adanya kendala teknis dalam penyelenggaraan event publik yakni, Pameran pembangunan Sulsel Ekspo, Dan beberapa penyelenggaraan Nasional Lainnya serta Data pada sistem Open data terkait informasi publik untuk semua OPD masih ada yang kurang melakukan up to date informasi public dengan masalah Seringkali terjadi kekurangan fasilitas dibidang komunikasi publik dan logistik media berupa penyediaan Wifi , Booth, dan konsumsi bagi insan media dan Koordinasi dan komitmen OPD untuk meng up to date data masih harus ditingkatkan dengan akar masalah Masih dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung teknis dan SDM pengelola Pengisian dashboard Open Data masih perlu mendapatkan pembinaan
- g. Layanan Hubungan Media dengan masalah pokok Mengingat peran media yang sangat besar dalam mendukung publikasi program pemerintah maka di butuhkan ruangan pers dan pertemuan khusus untuk menjalin hubungan baik yang menjadi masalah Masih belum adanya Ruang pers sebagai sarana bagi media dapat memperoleh press rilis yang di produksi oleh pemerintah kota Makassar dengan akar masalah Pertemuan dengan redaktur media yang dilakukan lewat Ruang Pers masih terkendala sarana dan prasarana
- h. Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan dengan pokok masalah Mengingat peran komunitas informasi dan komunikasi publik yakni Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk mendukung program dan visi-misi pemerintah kota Makassar maka dibutuhkan bimbingan teknis sehingga masalahnya Bimbingan



Teknis KIM masih perlu ditambahkan waktu dan kapasitas pesertanya, serta follow up semua peserta agar dapat berdaya secara efektif dengan akar masalah Masih terkendala pada teknis perencanaan kegiatan bimbingan teknis KIM

- i. Manajemen Komunikasi Krisis yang menjadi pokok masalah mengingat pentingnya pengelolaan isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Kota Makassar maka diperlukan pantauan khusus sehingga masalahnya terdapat pada Kajian khusus terkait pengelolaan dengan akar masalah terdapat pada Dibutuhkannya tim riset dan pengelola dalam menangani isu krisis
- j. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik yang menjadi pokok masalah Diera digital termasuk dalam sektor Usaha UMKM, maka menjadi keniscayaan mempersiapkan SDM kelompok Usaha berbasis strurtup digital harus diadakan sehingga masalahnya Masih dibutuhkan sarana dan Prasarana pendukung untuk melakukan inkubasi terhadap UMKM berbasi strurtup digital dengan akar masalah Dibutuhkannya tim khusus dan ruangan khusus untuk melakukan inkubasi
- k. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang menjadi pokok masalah Karena PPID Kota Makassar baru terbentuk maka perlu dilakukan pertemuan untuk membahas teknis fungsi PPID agar dapat efektif berjalan dengan masalah Pelaksanaan Fungsi PPID Utama dan PPID Pembantu masih harus disosialisasikan sehingga akar masalahnya adalah Dibutuhkan sara dan prasarana seperti ruang khusus untuk menerima permintaan dan laporan terkait informasi publik, mengadvokasi, dan mengedukasi SDM pengelola informasi publik
- l. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas yang menjadi masalah Masih perlu dilakuakan pemetaan komunitas informasi dan komunikasi publik dengan masalah Mempersiapkan perangkat tools dan SDM untuk melakukan pemetaan komunitas informasi dan komunikasi publik sehingga akar masalahnya adalah Dokumen data komunitas informasi dan komunikasi publik dan Melaksanakan kegiatan/event Khusus terkait
- m. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi pokok masalah pentingnya penyebaran informasi terkait kebijakan dan program



Pemerintah Kota Makassar dalam bentuk konten yang menarik dan kekinian dibutuhkan saran sehingga masalahnya terdapat pada Belum adanya peralatan standar podcast dan visual dengan akar masalah Pelaksanaan kegiatan yang bersifat Standar Profesional menjadi sulit dilaksanakan

4. Program Penyelenggaraan Statistik merupakan Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik, Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Adapun permasalahan yang dihadapi, yaitu:
 - a. Statistik harus memiliki nilai kualitas sehingga membutuhkan waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden.
 - b. Ketersediaan dukungan dari produsen SKPD, sehingga menyebabkan keterlambatan publikasi data.
 - c. Data sektoral yang beragam, tidak terpadu, belum terintegrasi masih tersebar di masing-masing SKPD.
 - d. Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM bidang statistik, serta Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai.
 - e. Masih terbatasnya upaya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan khususnya melalui media massa lokal maupun jaringan nasional dan Perlunya analisis berbasis teknologi terhadap berita dan informasi yang berkembang di media cetak, elektronik, maupun sosial.
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi terdapat kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan permasalahan sebagai berikut :
 - a. Belum tersedianya dokumen keamanan informasi lingkup Pemerintah Kota Makassar sehingga Dokumen keamanan informasi tidak menjadi prioritas utama dan Belum ada perhatian pemangku kebijakan terkait pentingnya keamanan Informasi
 - b. Belum tersedianya SDM berkualifikasi keamanan siber yang bertugas di Bidang Persandian dan Pola karir persandian dan keamanan informasi tidak memberikan daya tarik bagi ASN



- c. Computer Security Incident Response Team (CSIRT) belum terbentuk di Pemerintah Kota Makassar, belum ada personel dan wadah yang di beri tanggung jawab jika terjadi insiden keamanan siber, dan Insiden keamanan siber belum dapat di tangani
- d. Peralatan Counter Surveillance belum tersedia, mengingat Peralatan Counter Surveillance yang tidak di jual bebas dan Harga Peralatan Counter Surveillance yang relatif sangat mahal
- e. Pemanfaatan Jaring Komunikasi sandi belum maksimal dan Jaring Komunikasi Sandi perlu di upgrade untuk mengikuti perkembangan teknologi

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini pemerintah kota Makassar telah menetapkan visi misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2022-2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota Makassar Makassar.

Visi Kota Makassar Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang "Sombere' dan Smart City" dengan Imunitas Kuat untuk Semua

1. Kota Dunia : Makassar sebagai kota yang aman, nyaman dan berdaya saing tinggi dengan konektivitas dan kontribusi hingga ke jaringan nternasional (global chain) terhadap arus orang/barang, jasa, dan keuangan dengan fasilitas infrastruktur dan pelayanan public yang unggul bagi kesejahteraan warga kota Makassar.
2. Sombere dan Smart City : perwujudan dari nilai nilai luhur budaya etnis “ Bugis Makassar “ yang ramah tamah dan santun serta bersahabat dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan. Sombere berkaiatan dengan perangkat hati sedangkan smart city berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Diharapkan dengan Sombere dan Smart City menjadikan Makassar Kota cerdas yang berbasis teknologi serta berkarakter budaya local



3. Imunitas kuat : perwujudan Makassar sebagai resilient city yang tangguh yang memiliki kemampuan mempersiapkan diri menghadapi dan memulihkan diri ketika menghadapi guncangan di masa depan guna mendorong pembangunan berkelanjutan serta tangguh terhadap ancaman bencana termasuk dampak perubahan iklim dan semakin berkembangnya jumlah penduduk yang tinggal diperkotaan.
4. Untuk semua : Kota Makassar sebagai kota inklusif yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur jenis kelamin status social dan kemampuan diri sehingga tercipta kesetaraan dan inklusivitas social serta pemerataan pertumbuhan.

Berdasarkan rumusan visi pemerintah Kota Makassar, maka misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Revolusi SDM dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik kelas Dunia bersih dari Indikasi Korupsi.
2. Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial, dan Budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan yang kuat untuk Semua.
3. Restorasi Ruang Kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia "Sombere & Smart" City untuk Semua.

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah yang tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis War Room Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika

Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika selaras dan siap mendukung misi III Restorasi Ruang Kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia "Sombere & Smart" City untuk Semua.

Keterkaitan antara misi Pemerintah Kota Makassar dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :



1. Mewujudkan Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Kota Makassar
2. Peningkatan Pengunjung Tahunan Pada Website Pemerintah Kota Makassar
3. Peningkatan Data Tahunan Yang Ter-Update Pada Open Data Pemerintah Kota Makassar
4. Mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Yang Terhubung dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo
5. Melaksanakan layanan publik Yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
6. Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan
7. Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah
8. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
9. Melaksanakan keamanan informasi pemerintah

Adapun permasalahan yang dapat menghambat ketercapaian misi ke-III dijabarkan sebagai berikut berikut ini :

1. Terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Masih kurang terpenuhi pelayanan, diukur dari Indeks kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)
 - Kurangnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
 - ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah belum tepat waktu
 - Kurangnya kesempatan pendidikan dan pelatihan ASN Perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas
2. Terhadap Program Informasi Dan Komunikasi
 - Masih terbatasnya masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kota Makassar



- Kurangnya minat dan bantuan dana Untuk peningkatan pengunjung pertahun pada website pemerintah Kota Makassar
 - Masih terbatasnya peningkatan data pertahun yang ter-Update pada open data Pemerintah Kota Makassar
3. Terhadap Program Aplikasi Informatika
- Terbatasnya sumber daya manusia pengelola terhadap Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo
 - Belum maksimalnya pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
4. Terhadap Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Belum sepenuhnya Organisasi Perangkat Daerah (Opd) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan
 - Belum merata Organisasi Perangkat Daerah (Opd) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
 - Masih kurangnya Sistem Data Dan Statistik Yang Terintegrasi
5. Terhadap program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
- Masih rendahnya nilai Indeks keamanan Informasi (Indeks KAMI) sistem elektronik yang di gunakan oleh Pemerintah Kota Makassar.
 - Belum optimalnya penggunaan Jaring Komunikasi Sandi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam komunikasi perangkat daerah.

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika

Presiden Joko Widodo dengan jelas memberikan arahan bahwa kita harus membajak momentum pandemi COVID-19 dan melakukan lompatan besar sebagai upaya nyata untuk membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Arahan tersebut direalisasikan dengan mempercepat agenda transformasi digital nasional melalui 5 (lima) langkah yaitu:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet;
2. Mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis;



3. Mempercepat integrasi pusat data nasional;
4. Mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital; serta
5. Menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital.

Lima langkah percepatan transformasi digital yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi fondasi bagi pengembangan roadmap Indonesia Digital.

Indonesia Digital menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Enam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan. Enam Arahan Strategis dimaksud adalah:

1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi;
2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur cloud, dan identitas digital nasional;
3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif;
4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan
6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Untuk mengorkestrasi transformasi digital di Indonesia secara menyeluruh, Kemenkominfo menginisiasi perancangan Peta Jalan Indonesia Digital 2020 – 2024, yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja dan rute ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata yang dibangun berdasarkan inovasi, konektivitas digital, dan teknologi. Transformasi Digital pada tahun 2021 diarahkan untuk:

1. Mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. Mewujudkan public service delivery yang efisien dan cepat antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan;



3. Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (shared services); dan
4. Mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan (antara lain membuka kesempatan bagi perempuan dan kalangan disabilitas untuk berpartisipasi di dalam mata rantai perdagangan elektronik/e-commerce).

Berdasarkan arah kebijakan yang direncanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menjadi kewajiban bagi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung transformasi digital, yang bertujuan untuk akselerasi transformasi digital sistem pemerintahan, mewujudkan public service yang efisien dan cepat terutama bidang pendidikan dan Kesehatan, mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan layanan bersama atau share service, serta layanan akses internet yang merata khususnya di daerah terpencil dapat terwujud

3.4. Telaahan Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Keamanan ruang siber turut dipengaruhi beberapa isu-isu strategis diantaranya meningkatnya penetrasi internet dalam berbagai aspek kehidupan dan bergulirnya revolusi industri 4.0 yang menimbulkan berbagai ancaman di ruang siber. Dua tahun pasca dibentuknya, BSSN mulai menata pengelolaan tugas dan fungsi sehingga ancaman keamanan siber dapat diminimalisir. Pencapaian kinerja BSSN 2018-2019 semakin menguatkan posisi BSSN yang bertekad untuk melayani seluruh pemangku kepentingan baik disektor pemerintah, Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IIKN), dan ekonomi digital serta terus berusaha memenuhi harapan dari masyarakat untuk dapat menjaga stabilitas keamanan ruang siber.

Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan pengguna internet terbesar keempat di dunia, menghadapi peluang sekaligus ancaman besar dengan perkembangan teknologi digital dan internet baik dari dimensi sosial, politik, dan ekonomi, seperti provokasi politik, hoaks, SARA, ujaran kebencian, ideologi radikalisme, terorisme, hacking, pencurian data, penipuan daring, dan tindak kejahatan lainnya di ruang siber. Hal



tersebut harus dapat diantisipasi, dicegah, dan ditangani untuk menjamin kedaulatan bangsa.

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan pesatnya perkembangan pemanfaatan teknologi digital di berbagai bidang. Gelombang transformasi teknologi telah menjadikan seluruh warga dunia terhubung dalam sebuah 'desa global'. Perpaduan teknologi telekomunikasi, internet, dan penyiaran, telah mendorong munculnya infrastruktur jaringan pita lebar yang mendorong lahirnya ekonomi baru. Jaringan pita lebar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi dengan globalisasi ekonomi digital. Di sisi lain, keterhubungan dengan jaringan pita lebar global, memunculkan ancaman pada seluruh aset kritikal. Keterhubungan global ini membentuk dunia siber dengan ciri interaksi daring. Keterhubungan daring memberi banyak kemudahan, sekaligus menghadirkan kerentanan dan ancaman baru. Virus serta malware dapat dengan mudah dikirimkan lewat internet yang akhirnya dapat menyebabkan kerusakan pada sistem dan kebocoran data.

Penetapan roadmap "Making Indonesia 4.0" dengan salah satu inisiatif lintas sektornya yaitu pembangunan infrastruktur digital nasional, memaksa Indonesia untuk siap dalam memasuki era industri 4.0 dan implementasinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa bidang keamanan siber akan menjadi bagian penting dalam tatanan era revolusi Industri 4.0, dimana kejahatan siber semakin beragam dan berdampak masif secara nasional yang dapat mengancam kedaulatan bangsa.

Kegiatan prioritas nasional penguatan ketahanan dan keamanan siber dijabarkan ke dalam proyek-proyek prioritas nasional, dimana BSSN mengampu 4 (empat) proyek prioritas nasional dengan rincian proyek sebagai berikut:

1. Penguatan pengamanan infrastruktur siber
 - a. perluasan cakupan area national cybersecurity operation center.
 - b. pembangunan kapasitas national computer security incident response team.
 - c. pembangunan sistem monitoring pengendalian informasi.
 - d. penguatan national data center.
 - e. pembangunan infrastruktur voluntary vulnerability disclosure program.
 - f. pembangunan information sharing and analysis center.



2. Pembangunan dan penguatan computer emergency response team
 - a. pembentukan CSIRT pada sektor pemerintah.
 - b. pembentukan tim respon ancaman intelijen siber.
3. Pencegahan kejahatan siber dan peningkatan kerjasama internasional bidang siber, kerjasama regional, bilateral dan multilateral bidang keamanan siber.
4. Penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola keamanan SPBE pada K/L/D.
 - b. pengembangan sumber daya manusia di bidang keamanan siber.
 - c. penyelenggaraan program born to defence untuk sumber daya manusia pengelola keamanan siber sektor IIKN.
 - d. national cyber exercise drill test jumlah peserta yang mengikuti national cyber exercise drill test.
 - e. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang digital forensic.

Dari uraian di atas sudah sangat jelas peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengamankan dunia siber, dengan ikut berpartisipasi dengan menyediakan Kebijakan, Regulasi, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang handal di bidang keamanan siber, terlebih melihat posisi Kota Makassar sebagai pintu gerbang atau pusat perekonomian di Wilayah Indonesia Timur.

3.5. Telaahan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (BPS)

Undang-undang No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999, menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang



dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS.

Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis BPS untuk tahun 2020 – 2024 yang telah disesuaikan dengan visi, misi, dan arahan Presiden dan Wakil Presiden. Renstra BPS periode 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020 – 2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS 2020 – 2024 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (core business) BPS, yakni:

1. Penyediaan data statistik berkualitas;
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

Dengan tujuan strategis BPS untuk periode 2020 – 2024, yakni:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN;
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Dalam Renstra BPS 2020 – 2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan pembangunan statistik dilakukan secara menyeluruh oleh BPS melalui upaya mentransformasi seluruh kegiatan statistik dalam program Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia (Statcap CERDAS).

Salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Indonesia pada tanggal 12 juni 2019, Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia sendiri merupakan kebijakan tata kelola data



dari pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, data-data tersebut juga mudah diakses dan dibagi pakaikan antara instansi pusat dan instansi daerah.

Pemerintah Kota Makassar khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika berkomitmen dalam memberikan data statistik yang akurat sesuai dengan tugasnya sebagai Walidata. Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan data statistik di Kota Makassar, diperlukan berbagai macam data pendukung yang akan memberikan informasi mengenai berbagai aspek meliputi data umum mencakup geografi, pemerintahan dan struktur organisasi, data sosial budaya, data sumber daya alam, data lingkungan hidup dan tata ruang, data infrastruktur, data pariwisata, data perhubungan, data kesehatan, pendidikan, investasi dan pendapatan daerah serta data politik. Informasi data statistik ini selain sebagai bahan evaluasi pembangunan yang telah dilakukan selama ini, juga sebagai bahan masukan penetapan kebijakan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar tahun mendatang. Selanjutnya dalam penyusunan Statistik khususnya Data Sektoral Kota Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Perangkat daerah terkait dalam pengambilan data.

3.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso.

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar berdasarkan Sasaran Renstra Kajian Lingkungan yaitu belum meratanya penyebaran



informasi kepada seluruh masyarakat Kota Makassar. Kota Makassar yang terdiri dari 15 Kecamatan dan sebaran penduduknya hampir merata di 15 Kecamatan pada dasarnya bisa sebagai sarana untuk Pengembangan Informasi dan Komunikasi. Pengembangan dan pengendalian jaringan telekomunikasi yang menggunakan pusat server diarahkan pada penggunaan server bersama untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang. Pengembangan jaringan telekomunikasi ini tersebar di seluruh kecamatan. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya Kota Makassar sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional yang mempertimbangkan keserasian fungsi pelayanan regional dan lokal.

2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS ini selanjutnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan KLHS RPJMD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah dimaksudkan untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan termuat dalam Rancangan RPJMD Kota Makassar.

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi KLHS, yakni penguatan pelaksanaan dan pengawasan programprogram ramah lingkungan yang telah direncanakan, salah satunya pengawasan pemanfaatan



ruang terkait pengembangan infrastruktur telekomunikasi berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Dinas Komunikasi dan Informatika, memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi KLHS, yakni pengembangan sistem informasi untuk monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya dengan arah kebijakan pengendalian keamanan data dan informasi layanan (Aplikasi, data, jaringan, perangkat keras) yang dilaksanakan melalui program Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

3.7. Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan, dan kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika maka dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :

1. One Map One Data ;
2. Penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kota Makassar (SPBE) ;
3. Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE ;
4. Belum Optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya Smart City;
5. Belum optimalnya peran Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) di Pemerintah Kota Makassar;
6. Belum Optimalnya sistem integrasi data statistik sektoral daerah;
7. Belum terbentuknya Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk penanggulangan insiden siber yang terjadi di Pemerintah Kota Makassar.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Makassar. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Makassar.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar tahun 2022-2026 adalah:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK yang terstandarisasi dalam rangka Implementasi Smart City;
2. Mewujudkan keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau E-Government.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar tahun 2022-2026 adalah :

1. Terwujudnya Jaringan Internet yang aman dan handal di Pemerintah Kota Makassar;
2. Terwujudnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota Makassar;
3. Terwujudnya layanan keamanan informasi di Pemerintah Kota Makassar;
4. Meningkatnya Kesadaran Keamanan Informasi di Pemerintah Kota Makassar.



Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.1. Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Beserta Indikator (Tabel T-C.25) sebagai berikut.

Tabel 4.1.1 Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Beserta Indikator (Tabel TC 25)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK yang terstandarisasi dalam rangka Implementasi Smart City	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
1.1.	Terwujudnya Jaringan Internet yang aman dan handal di Pemerintah Kota Makassar	Cakupan Layanan Bandwidth internet 20 Mbps di pemerintah Kota Makassar	85%	87%	89%	91%	93%
1.2.	Terwujudnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota Makassar	Cakupan Layanan Pemerintah Kota Makassar Yang Terdigitalisasi	30%	40%	50%	60%	70%
2.	Mewujudkan keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau E-Government	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	170	200	240	280	320
2.1.	Terwujudnya layanan keamanan informasi di Pemerintah Kota Makassar	Cakupan Sistem Elektronik Yang Telah Dilakukan Pengujian Kerentanan dan Penilaian Resiko	10%	15%	20%	25%	30%
2.2.	Meningkatnya Kesadaran Keamanan Informasi di Pemerintah Kota Makassar	Level Kesadaran Keamanan Informasi	70%	73%	76%	79%	81%



Dari tabel tersebut dapat dijelaskan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah sejalan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke III yaitu “Restorasi Ruang Kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia "Sombere & Smart" City untuk Semua.



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Hal tersebut diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah, pada ketentuan umum pasal 1, disebutkan bahwa :

- Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
- Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Makassar Tahun 2022-2026.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar (Tabel T-C.26.)

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang "Sombere' Dan Smart City" Dengan Imunitas Kuat Untuk Semua								
Misi 3: Restorasi Ruang Kota Yang Inklusif Menuju Kota Nyaman Kelas Dunia "Sombere & Smart" City Untuk Semua								
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK yang terstandarisasi dalam rangka Implementasi Smart City	1.1. Terwujudnya Jaringan Internet yang aman dan handal di Pemerintah Kota Makassar	Mengoptimalkan penggunaan Bandwidth Internet untuk kegiatan yang menunjang produktifitas Instansi	Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terkait performansi jaringan perbulan dan pertahun demi terjaganya kualitas jaringan yang didistribusi ke tiap - tiap instansi	Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terkait performansi jaringan perbulan dan pertahun demi terjaganya kualitas jaringan yang didistribusi ke tiap - tiap instansi	Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terkait performansi jaringan perbulan dan pertahun demi terjaganya kualitas jaringan yang didistribusi ke tiap - tiap instansi	Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terkait performansi jaringan perbulan dan pertahun demi terjaganya kualitas jaringan yang didistribusi ke tiap - tiap instansi	Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terkait performansi jaringan perbulan dan pertahun demi terjaganya kualitas jaringan yang didistribusi ke tiap - tiap instansi
			Memberi Akses wifi gratis pada saat di luar jam kantor ke pada Masyarakat	Menyediakan Akses wifi gratis pada area-area publik milik Pemerintah Kota Makassar	Menyediakan Akses wifi gratis pada area pulau-pulau terpencil	Menyediakan Akses wifi gratis di tingkat Sekolah Dasar dan Menengah Pertama	Memberikan jaminan layanan wifi gratis yang handal dan aman ke pada Masyarakat	
			Menyediakan Insfrastruktur jaringan yang terstandarisasi	Menyediakan Regulasi dan aturan terkait penyediaan Infrastruktur Jaringan Internet yang di gunakan di Pemerintah Kota Makassar	Melakukan Sosialisasi terkait penyediaan infrastruktur jaringan internet di Pemerintah Kota Makassar	Pemasangan peralatan Jaringan internet harus mendapatkan rekomendasi dari Diskominfo	Audit dan Evaluasi Infrastruktur Jaringan Internet di Pemerintah Kota Makassar	Audit dan Evaluasi Infrastruktur Jaringan Internet di Pemerintah Kota Makassar
		1.2. Terwujudnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota Makassar	Pemberian dukungan SDM dan Infrastruktur IT dalam pembangunan Super Mall Pelayanan Publik	Koordinasi Perencanaan Makassar Virtual Economic Center (MAVEC) meliputi Cyber Security, Data Center, Fire Supression System, Building Security System	Pembangunan Building Security System, serta jaringan dan infrastruktur teknologi informasi MAVEC.	Operasional dan penguatan Sumber Daya Manusia terkait pengelolaan MAVEC	Pengembangan dan Update Sistem Keamanan Informasi	Memberikan Jaminan Operasional yang handal dalam pemanfaatan MAVEC
			Meningkatkan kompetensi SDM IT melalui pelatihan, kursus dan workshop	Meningkatkan kompetensi SDM IT melalui pelatihan, kursus dan workshop	Meningkatkan kompetensi SDM IT melalui pelatihan, kursus dan workshop	Meningkatkan kompetensi SDM IT melalui pelatihan, kursus dan workshop	Meningkatkan kompetensi SDM IT melalui pelatihan, kursus dan workshop	Meningkatkan kompetensi SDM IT melalui pelatihan, kursus dan workshop
			Meningkatkan layanan pemerintah yang terdigitalisasi	Melakukan evaluasi terkait layanan Pemerintah Kota Makassar	Mengoptimalkan transformasi digital layanan Pemerintah Kota Makassar	Mengoptimalkan transformasi digital layanan Pemerintah Kota Makassar	Mengoptimalkan transformasi digital layanan Pemerintah Kota Makassar	Mengoptimalkan transformasi digital layanan Pemerintah Kota Makassar
			Membangun pemahaman terkait layanan satu data dan penguatan regulasi	Peningkatan Platform Satu data dan SDM terkait pengelolaan layanan satu data	Migrasi data dari berbagai platform ke platform satu data yang telah disediakan	Mengoptimalkan pemanfaatan platform satu data yang sudah ada	Mengoptimalkan pemanfaatan platform satu data yang sudah ada	Mengoptimalkan pemanfaatan platform satu data yang sudah ada
2.	Mewujudkan keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau E-Government	2.1. Terwujudnya layanan keamanan informasi di Pemerintah Kota Makassar	Melaksanakan pengembangan layanan keamanan informasi	Melakukan Asistensi dalam rangka Pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT)	Launching Pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT)	Penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber dalam rangka penanggulangan insiden siber	Melakukan kerjasama antar lembaga CSIRT di Indonesia dalam hal pencegahan dan penanggulangan insiden siber	Menmngoptimalkan pengelolaan CSIRT di Pemerintah Kota Makassar
			Menyediakan Dokumen Kebijakan Keamanan Informasi	Menyusun dokumen Pedoman Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berbasis ISO 27001:2013	Melakukan Bimtek pengelolaan SMKI di Pemerintah Kota Makassar	Melakukan evaluasi terkait kepatuhan Pedoman SMKI Kota Makassar	Melakukan evaluasi terkait kepatuhan Pedoman SMKI Kota Makassar	Melakukan evaluasi terkait kepatuhan Pedoman SMKI Kota Makassar
		2.2. Meningkatnya Kesadaran Keamanan Informasi di Pemerintah Kota Makassar	Melakukan literasi yang inofatif dan terukur dalam rangka membangun budaya keamanan informasi	Membuat bahan literasi dalam bentuk Banner dan Buku Saku yang interaktif terkait keamanan informasi di lingkup Pemerintah Kota Makassar	Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait Internet Sehat kepada Pelajar di Kota Makassar	Membuat video singkat yang interaktif guna menumbuhkan kesadaran keamanan informasi masyarakat yang di sebar melalui media digital	Melakukan Pengukuran Level Kesadaran Keamanan Informasi di Pemerintah Kota Makassar	Melakukan Pengukuran Level Kesadaran Keamanan Informasi di Pemerintah Kota Makassar
			Mengoptimalkan peran PPID dalam pengelolaan Informasi Daerah	Melakukan Pembinaan SDM PPID Pembantu dalam mengelola informasi di SKPD	Melakukan Pembinaan SDM PPID Pembantu dalam mengelola informasi di SKPD	Melakukan Pembinaan SDM PPID Pembantu dalam mengelola informasi di SKPD	Melakukan Pembinaan SDM PPID Pembantu dalam mengelola informasi di SKPD	Melakukan Pembinaan SDM PPID Pembantu dalam mengelola informasi di SKPD
			Pelaksanaan struktur organisasi dan menjalankan fungsi PPID utama dan PPID Pembantu serta membangun dan mengembangkan Wabsite dan media sosial PPID	Membangun dan menjaga sistem kerja PPID Utama dan PPID Pembantu	Mengevaluasi dan mengembangkan sistem kerja PPID Utama dan Pembantu	Mengevaluasi dan mengembangkan sistem kerja PPID Utama dan Pembantu	Mengevaluasi dan mengembangkan sistem kerja PPID Utama dan Pembantu	Mengevaluasi dan mengembangkan sistem kerja PPID Utama dan Pembantu



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Rencana program dan kegiatan serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar yang akan dan harus dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kota Makassar Tahun 2012-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2022-2026 (Tabel T-C.27.)

TUJUAN	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR KINERJA PERANGKAT DAERAH		
									TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
URUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										43.995.000.000		45.439.615.830		47.757.008.273		50.135.858.686		52.633.651.620		239.961.134.409	
		2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	90%	90%	11.239.304.900	90%	11.801.270.145	90%	12.391.333.652	90%	13.010.900.335	90%	13.661.445.352	90%	62.104.254.384
		2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	100%	315.449.500	100%	331.221.975	100%	347.783.074	100%	365.172.227	100%	383.430.839	100%	1.743.057.615
		2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3 Dokumen	2 Dokumen	100.293.000	2 Dokumen	105.307.650	2 Dokumen	110.573.033	2 Dokumen	116.101.684	2 Dokumen	121.906.768	10 Dokumen	554.182.135
		2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA -SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	16.370.000	1 Dokumen	17.188.500	1 Dokumen	18.047.925	1 Dokumen	18.950.321	1 Dokumen	19.897.837	5 Dokumen	90.454.584
		2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	15.031.000	1 Dokumen	15.782.550	1 Dokumen	16.571.678	1 Dokumen	17.400.261	1 Dokumen	18.270.274	5 Dokumen	83.055.763
		2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	16.629.000	1 Dokumen	17.460.450	1 Dokumen	18.333.473	1 Dokumen	19.250.146	1 Dokumen	20.212.653	5 Dokumen	91.885.722
		2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA- SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	16.629.000	1 Dokumen	17.460.450	1 Dokumen	18.333.473	1 Dokumen	19.250.146	1 Dokumen	20.212.653	5 Dokumen	91.885.722
		2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	47.652.000	1 Dokumen	50.034.600	1 Dokumen	52.536.330	1 Dokumen	55.163.147	1 Dokumen	57.921.304	5 Dokumen	263.307.380
		2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	102.845.500	1 Dokumen	107.987.775	1 Dokumen	113.387.164	1 Dokumen	119.056.522	1 Dokumen	125.009.348	5 Dokumen	568.286.309
		2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	6.997.147.998	100%	7.347.005.398	100%	7.714.355.668	100%	8.100.073.451	100%	8.505.077.124	100%	38.663.659.639
		2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	48 ASN	48 ASN	6.305.511.998	50 ASN	6.620.787.598	52 ASN	6.951.826.978	54 ASN	7.299.418.327	56 ASN	7.664.389.243	260 ASN	34.841.934.143
		2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan yang disediakan	18 Orang	18 Orang	539.600.000	18 Orang	566.580.000	18 Orang	594.909.000	18 Orang	624.654.450	18 Orang	655.887.173	90 Orang	2.981.630.623
		2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Persentase Laporan Pertanggung Jawaban yang tersedian	100%	100%	152.036.000	100%	159.637.800	100%	167.619.690	100%	176.000.675	100%	184.800.708	100%	840.094.873
		2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	0%	0%	-	70%	-	30%	-	-	-	-	100%	-	
		2	16	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang di buat	1 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-

RENSTRA DISKOMINFO TAHUN 2021-2026

2	16	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Gedung Kantor	0 Gedung	0 Gedung		0 Gedung	-	0 Gedung	-	0 Gedung	-	0 Gedung	-	0% Gedung	-
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	364.500.000	100%	382.725.000	100%	401.861.250	100%	421.954.313	100%	443.052.028	100%	2.014.092.591
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	145 Pasang Pakaian	150 Pasang Pakaian	112.500.000	155 Pasang Pakaian	118.125.000	170 Pasang Pakaian	124.031.250	170 Pasang Pakaian	130.232.813	172 Pasang Pakaian	136.744.453	817 Pasang Pakaian	621.633.516
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Orang	13 Orang	252.000.000	14 Orang	264.600.000	17 Orang	277.830.000	19 Orang	291.721.500	19 Orang	306.307.575	82 Orang	1.392.459.075
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.861.558.018	100%	1.954.635.919	100%	2.052.367.715	100%	2.154.986.101	100%	2.262.735.406	100%	10.286.283.158
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis	63 Buah	1.362.084.125	73 Buah	1.430.188.331	83 Jenis	1.501.697.748	93 Jenis	1.576.782.635	103 Jenis	1.655.621.767	415 Buah	7.526.374.606
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Bahan Logistik Kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	156.015.393	12 Bulan	163.816.163	12 Bulan	172.006.971	12 Bulan	180.607.319	12 Bulan	189.637.685	60 Bulan	862.083.531
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan	17.378 Lembar	11.520 Lembar	40.368.500	11.520 Lembar	42.386.925	11.520 Lembar	44.506.271	11.520 Lembar	46.731.585	11.520 Lembar	49.068.164	57.600 Lembar	223.061.445
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	184 Eksemplar	202 Eksemplar	19.090.000	202 Eksemplar	20.044.500	202 Eksemplar	21.046.725	202 Eksemplar	22.099.061	202 Eksemplar	23.204.014	1010 Eksemplar	105.484.301
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Yang Tersedia	19 Orang	29 Orang	284.000.000	29 Orang	298.200.000	29 Orang	313.110.000	29 Orang	328.765.500	29 Orang	345.203.775	55 Orang	1.569.279.275
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	0%	100%	480.000.000	100%	504.000.000	100%	529.200.000	100%	555.660.000	100%	583.443.000	100%	2.652.303.000
2	16	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional Lapangan	0 Unit	1 Unit	480.000.000	1 Unit	504.000.000	1 Unit	529.200.000	1 Unit	555.660.000	1 Unit	583.443.000	5 Unit	2.652.303.000
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	677.248.384	100%	711.110.803	100%	746.666.343	100%	783.999.661	100%	823.199.644	100%	3.742.224.835
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Tenaga Honorer Sekertariat yang mendapatkan Gaji	17 Orang	17 Orang	357.677.000	17 Orang	375.560.850	17 Orang	394.338.893	17 Orang	414.055.837	17 Orang	434.758.629	85 Orang	1.976.391.209
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	280.968.384	3 Jenis	295.016.803	3 Jenis	309.767.643	3 Jenis	325.256.026	3 Jenis	341.518.827	3 Jenis	1.552.527.683
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	2 Jasa	2 Jasa	38.603.000	2 Jasa	40.533.150	2 Jasa	42.559.808	2 Jasa	44.687.798	2 Jasa	46.922.188	2 Jasa	213.305.943
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	543.401.000	100%	570.571.050	100%	599.099.603	100%	629.054.583	100%	660.507.312	100%	3.002.633.547
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah alat angkut darat bermotor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 Unit	1 Unit	40.029.650	1 Unit	42.031.133	1 Unit	44.132.689	1 Unit	46.339.324	1 Unit	48.656.290	5 Unit	221.189.085
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah alat angkut darat bermotor Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	15 Unit	15 Unit	267.051.350	15 Unit	280.403.918	15 Unit	294.424.113	15 Unit	309.145.319	15 Unit	324.602.585	75 Unit	1.475.627.285
2	16	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meja kerja/rapat yang mendapat pemeliharaan	20 Unit	37 Unit	5.920.000	37 Unit	6.216.000	37 Unit	6.526.800	37 Unit	6.853.140	37 Unit	7.195.797	185 Unit	32.711.737
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan gedung tempat kerja	1 Jenis	1 Jenis	133.000.000	1 Jenis	139.650.000	1 Jenis	146.632.500	1 Jenis	153.964.125	1 Jenis	161.662.331	1 Jenis	734.908.956
2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah alat kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	40 Unit	40 Unit	97.400.000	40 Unit	102.270.000	40 Unit	107.383.500	40 Unit	112.752.675	40 Unit	118.390.309	200 Unit	538.196.484

TUJUAN 2. MEWUJUDKAN KEAMANAN INFORMASI DALAM Mendukung PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK ATAU E-GOVERNMENT	SASARAN 2.2. MENINGKATNYA KESADARAN KEAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	2	16	02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENJADI SASARAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	75,30%	77,50%	8.397.812.600	80,00%	8.817.703.230	82,50%	9.304.000.043	85,00%	9.760.200.045	85,50%	10.239.210.047	85,50%	105.100.000.000	
							PERSENTASE PENINGKATAN PENGUNJUNG PERTAHUN PADA WEBSITE PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	40,00%	50,00%		70,00%		80,00%		90,00%		100%		100%		
							PERSENTASE PENINGKATAN DATA PERTAHUN YANG TER-UPDATE PADA OPEN DATA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	3,92%	21,56%		39,21%		56,86%		74,50%		100%		100%		
		2	16	02	2.01			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50%	100%	8.397.812.600	100%	8.817.703.230	100%	9.304.000.043	100%	9.760.200.045	100%	10.239.210.047	100%
		2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Dukungan Informasi Komunkasi Publik	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-
		2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Buletin Pemerintah Kota Makassar	4.800 Eksemplar	4.800 Eksemplar	519.800.000	4.800 Eksemplar	545.790.000	4.800 Eksemplar	573.079.500	4.800 Eksemplar	601.733.475	4.800 Eksemplar	631.820.149	12 Bulan	2.872.223.124
		2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Dialog Kepala Daerah	0 Kegiatan	8 Dialog	249.835.000	8 Dialog	262.326.750	8 Dialog	275.443.088	8 Dialog	289.215.242	8 Dialog	303.676.004	8 Dialog	1.380.496.083
		2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah portal Pemerintah Kota Makassar yang di kelola	2 Portal	3 Portal	530.305.000	3 Portal	556.820.250	3 Portal	584.661.263	3 Portal	613.894.326	3 Portal	644.589.042	12 Bulan	2.930.269.880
		2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Video Promosi	0 Video	3 Video	122.075.600	5 Video	128.179.380	7 Video	180.000.000	7 Video	180.000.000	7 Video	180.000.000	29 Video	790.254.980
		2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pameran yang di ikuti	0 Kegiatan	4 pameran	275.506.800	4 pameran	289.282.140	4 pameran	303.746.247	4 pameran	318.933.559	4 pameran	334.880.237	27 Kegiatan	1.522.348.984
		2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Kerjasama Media	66 Paket	258 Paket	5.049.644.200	280 Paket	5.302.126.410	310 Paket	5.567.232.731	340 Paket	5.845.594.367	370 Paket	6.137.874.085	1558 Paket	27.902.471.793
		2	16	02	2.01	08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	0 KIM	2 KIM	225.165.000	2 KIM	236.423.250	2 KIM	248.244.413	2 KIM	260.656.633	2 KIM	273.689.465	10 KIM	1.244.178.760
		2	16	02	2.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Informasi positif Pemerintah Kota Makassar di Media Sosial	0 Informasi	700 Informasi	144.251.200	700 Informasi	151.463.760	700 Informasi	159.036.948	700 Informasi	166.988.795	700 Informasi	175.338.235	3500 Informasi	797.078.939
		2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Bimtek Sumber Daya Komunikasi Publik	0 Kegiatan	8 Kegiatan	343.991.800	8 Kegiatan	361.191.390	8 Kegiatan	379.250.960	8 Kegiatan	398.213.507	8 Kegiatan	418.124.183	40 Kegiatan	1.900.771.840
		2	16	02	2.01	11	penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Daerah	Jumlah SDM PPID yang dibina	0 Orang	800 Orang	513.702.000	800 Orang	539.387.100	800 Orang	566.356.455	800 Orang	594.674.278	800 Orang	624.407.992	4000 Orang	2.838.527.824
		2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Koordinasi Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	0 Kegiatan	8 Kegiatan	423.536.000	8 Kegiatan	444.712.800	8 Kegiatan	466.948.440	8 Kegiatan	490.295.862	8 Kegiatan	514.810.655	40 Kegiatan	2.340.303.757
		2	16	02	2.01	13	Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	0 Sarana	0 Sarana	-	0 Sarana	-	0 Sarana	-	0 Sarana	-	0 Sarana	-	0 Sarana	-
TUJUAN 1. MENINGKATKAN PENYEDIAAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR TIK YANG TERSTANDARISASI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SMART CITY	SASARAN 1.1. TERWUJUDNYA JARINGAN INTERNET YANG AMAN DAN HANDAL DI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR SASARAN 1.2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA SISTEM	2	16	03		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMINFO MAKASSAR	100%	100%	23.165.173.100	100%	24.323.431.755	100%	25.539.603.343	100%	26.816.583.510	100%	28.157.412.685	100%	128.002.204.393	

RENSTRA DISKOMINFO TAHUN 2021-2026

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR							PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	16,43%	32,87%		49,31%		65,75%		95,89%		100%		100%	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan e-governmentDi Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90%	100%	23.165.173.100	100%	24.323.431.755	100%	25.539.603.343	100%	26.816.583.510	100%	28.157.412.685	100%	128.002.204.393
	2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tata Kelola IT dalam Pemerintahan	0,00%	100%	125.637.000	100%	131.918.850	100%	138.514.793	100%	145.440.532	100%	152.712.559	100%	694.223.733
	2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase Operasional Pusat data Daerah	90,00%	90,00%	3.512.153.600	90,00%	3.687.761.280	90,00%	3.872.149.344	90,00%	4.065.756.811	90,00%	4.269.044.652	90,00%	19.406.865.687
	2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase integrasi data yang terverifikasi	0,00%	100%	809.031.000	100%	849.482.550	100%	891.956.678	100%	936.554.511	100%	983.382.237	100%	4.470.406.976
	2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang terpublikasi dalam proses bisnis Pemerintah Daerah	0 Aplikasi	4 Aplikasi	174.608.000	4 Aplikasi	183.338.400	4 Aplikasi	192.505.320	4 Aplikasi	202.130.586	4 Aplikasi	212.237.115	4 Aplikasi	964.819.421
	2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah regulasi yang diakomodasi	0 Regulasi	2 Regulasi	263.269.000	2 Regulasi	276.432.450	2 Regulasi	290.254.073	2 Regulasi	304.766.776	2 Regulasi	320.005.115	2 Regulasi	1.454.727.414
	2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase peningkatan pengembangan dan pengelolaan Kota cerdas	0,00%	50%	51.775.000	50%	54.363.750	50%	57.081.938	50%	59.936.034	50%	62.932.836	50%	286.089.558
	2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Layanan Internet Yang Tersedia	4 Jenis	4 Jenis	18.228.699.500	4 Jenis	19.140.134.475	4 Jenis	20.097.141.199	4 Jenis	21.101.998.259	4 Jenis	22.157.098.172	4 Jenis	100.725.071.604
							Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi Yang di Bangun	0 Infrastruktur	0 Infrastruktur		2 Infrastruktur	0 Infrastruktur	0 Infrastruktur	0 Infrastruktur	0 Infrastruktur	0 Infrastruktur	2 Infrastruktur			
	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	49,00%	58,82%	473.534.000	68,62%	497.210.700	78,43%	522.071.235	88,23%	548.174.797	100%	575.583.537	100%	2.616.574.268
							PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MELAKUKAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	19,60%	49,00%		58,62%		78,43%		88,23%		100%	100%		
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Statistik Sektoral di Pemerintah Kota Makassar	49,00%	58,82%	473.534.000	68,62%	497.210.700	78,43%	522.071.235	88,23%	548.174.797	100%	575.583.537	100%	2.616.574.268
	2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen statistik sektoral yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	339.322.000	2 Dokumen	356.288.100	2 Dokumen	374.102.505	2 Dokumen	392.807.630	2 Dokumen	412.448.012	2 Dokumen	1.874.968.247
	2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan peningkatan SDM Statistik Sektoral	0 SDM	0 SDM	-	0 SDM	-	0 SDM	-	0 SDM	-	0 SDM	-	0 SDM	-
	2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Portal Metadata Yang Tersedia	1 Portal	1 Portal	134.212.000	1 Portal	140.922.600	1 Portal	147.968.730	1 Portal	155.367.167	1 Portal	163.135.525	1 Portal	741.606.021
	2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik	jumlah SDM yang tersertifikasi dalam Peningkatan Kelembagaan Statistik Sektoral	0 SDM	0 SDM	-	0 SDM	-	0 SDM	-	0 SDM	-	0 SDM	-	0 SDM	-
	2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Web data storage berbasis cloud	0 Web Data	0 Web Data	-	0 Web Data	-	0 Web Data	-	0 Web Data	-	0 Web Data	-	0 Web Data	-

		2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan kelembagaan statistik sektoral	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	-	
TUJUAN 2. MEWUJUDKAN KEAMANAN INFORMASI DALAM Mendukung PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK ATAU E-GOVERNMENT	SASARAN 2.1. TERWUJUDNYA LAYANAN KEAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	TINGKAT KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH	29,55%	35,23%	719.175.400	40,91%	755.134.170	46,59%	792.890.879	52,27%	920.679.907	57,95%	866.713.902	57,95	4.054.594.257
								PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENGGUNAKAN SANDI DALAM KOMUNIKASI PERANGKAT DAERAH	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
		2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	40%	45%	622.550.400	50%	653.677.920	55%	686.361.816	60%	720.679.907	65%	756.713.902	65%	3.439.983.945
			21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keamanan Informasi	1 Dokumen	1 Dokumen	162.864.000	1 Dokumen	171.007.200	1 Dokumen	179.557.560	1 Dokumen	188.535.438	1 Dokumen	197.962.210	5 Dokumen	899.926.408
			21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah yang mendapatkan peningkatan pengetahuan di Bidang Keamanan Informasi	---	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-
		2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Konten Peringatan Ancaman Keamanan dan Kerentanan Sistem Elektronik	0 Konten	60 Konten	349.392.000	120 Konten	366.861.600	120 Konten	385.204.680	120 Konten	404.464.914	120 Konten	424.688.160	540 Konten	1.930.611.354
		2	21	02	2.01	04	Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/Kota	Jumlah layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/Kota	3 Layanan	3 Layanan	110.294.400	3 Layanan	115.809.120	3 Layanan	121.599.576	3 Layanan	127.679.555	3 Layanan	134.063.533	3 Layanan	609.446.183
		2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterhubungan Perangkat Daerah Dalam Jaring Komunikasi Sandi	100%	100%	96.625.000	100%	101.456.250	100%	106.529.063	100%	200.000.000	100%	110.000.000	100%	614.610.313
		2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jaring Komunikasi Sandi Yang disediakan	0	1 JKS	96.625.000	1 JKS	101.456.250	1 JKS	106.529.063	2 JKS	200.000.000	1 JKS	110.000.000	6 JKS	614.610.313



Terkait Matriks di atas berikut ini usulan nomenklatur program dan kegiatan utama non kesekretariatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar:

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- 2) Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
- 3) Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah;
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- 6) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
- 7) Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media;
- 8) Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan;
- 9) Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis;
- 10) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- 11) Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Daerah
- 12) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas; dan
- 13) Sub Kegiatan Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi. Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Aplikasi Informatika

a. Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik;



- 4) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
 - 6) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas; dan
 - 7) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.
3. Program Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral;
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;
 - 3) Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral;
 - 4) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik;
 - 5) Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur; dan
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Daerah.
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik; dan
 - 4) Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/Kota.
 - b. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Makassar. Target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026 sebagai berikut :



Tabel 7.1 Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar

No.	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)	1,97	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
1.1.	Cakupan Layanan Bandwidth internet 20 Mbps di pemerintah Kota Makassar	83%	85%	87%	89%	91%	93%
1.2.	Cakupan Layanan Pemerintah Kota Makassar Yang Terdigitalisasi	20%	30%	40%	50%	60%	70%
2.	Indek Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	165	170	200	240	280	320
2.1.	Cakupan Sistem Elektronik Yang Telah Dilakukan Pengujian Kerentanan dan Penilaian Resiko	4%	10%	15%	20%	25%	30%
2.2.	Level Kesadaran Keamanan Informasi	---	70%	73%	76%	79%	81%

**Tabel 7.2 Tabel Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022 – 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar**

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urusan Komunikasi dan Informatika								
1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi di Tingkat Kecamatan	127	128,68	132,65	139,63	143,05	150,58	150,58
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	100	100	100	100	100	100	100
Urusan Statistik								
3	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Buku Kota dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Urusan Persandian								
5	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100



Tabel 7.3 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Tabel T-C.28.)

Program	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Kota Makassar	75,30%	77,50%	80,00%	82,50%	85,00%	85,50%	85,50%
	Persentase Peningkatan Pengunjung Pertama Pada Website Pemerintah Kota Makassar	40,00%	50,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100%	100%
	Persentase Peningkatan Data Pertama Yang Ter-Update Pada Open Data Pemerintah Kota Makassar	3,92%	21,56%	39,21%	56,86%	74,50%	100%	100%
Program Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	30,00%	32,87%	49,31%	65,75%	95,89%	100,00%	100,00%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan	49,00%	58,82%	68,62%	78,43%	88,23%	100,00%	100,00%
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	19,60%	49,00%	58,82%	78,43%	88,23%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	29,55%	35,23%	40,91%	46,59%	52,27%	57,95%	57,95%
	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB VIII PENUTUP

Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2022-2026 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Renstra SKPD merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar tahun 2022-2026, merupakan rencana tindak seluruh seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Sebagai pedoman dan rujukan bagi jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkedudukan sebagai sub sistem dari dokumen perencanaan induk Pemerintah Kota Makassar. Oleh karena itu dalam penyusunannya merujuk dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2021-2026.

Renstra merupakan dokumen perencanaan, sebegus apapun isi dari Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Kominfo menjadi SKPD yang hebat dan berhasil mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh – sungguh dari seluruh aparatur Dinas Kominfo untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas Kominfo, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus bisa dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia merupakan organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan

proporsional berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Namun meskipun demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Kota Makassar Tahun 2021-2026

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2022-2026 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam RPJMD Kota Makassar 2021-2026.

Makassar, 20 Oktober 2021

**Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Makassar**



Denny Hidayat
Pangkat: Pembina
Nip.: 19750505 200003 1 009



**PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENSTRA BADAN PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Ada
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusun Agenda Kerja	Ada			
2	Penyiapan data dan informasi	Ada			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Ada			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	Ada			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	Ada			
6	Analisis terhadap dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	Ada			
7	Perumusan isu-isu strategis	Ada			
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota				
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	Ada			
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah perangkat daerah kabupaten/kota	Ada			
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah perangkat kabupaten/kota	Ada			
12	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rencana Renstra-perangkat daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah kabupaten/kota	Ada			



RENSTRA DISKOMINFO TAHUN 2021-2026

13	Perumusan strategi dan Kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	Ada			
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator, kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	Ada			
15	Perumusan indikator kinerja perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	Ada			
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	Ada			
17	Perumusan indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	Ada			
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	Ada			
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota	Ada			
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	Ada			

Makassar, 20 Oktober 2021

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar


Denny Hidayat
 Pangkat: Pembina
 Nip.: 19750505 200003 1 009